



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **PERAN DATUK ADAT SEBAGAI HAKAM DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN SUAMI ISTRI DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU**

## **TESIS**

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi  
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)**



Oleh :

**YULIANTI  
NIM. 21790225832**

**Pembimbing I  
Prof. Dr. H. Sudirman, M. Johan, MA**

**Pembimbing II  
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1442 H./2020 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Faks, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lembaran Pengesahan

Yulianti  
21790225832  
M.H. ( Magister Hukum)  
Peran Datuk Adat Sebagai Hakam Dalam  
Pencegahan Perceraian Suami Istri di Desa Muara  
Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan  
Hulu

Dr. H. Muslim Afandi, M. Pd  
Penguji I / Ketua

Dr. Afiq Budiawan, M.H.I  
Penguji II /Sekretaris

Dr. H. Zulkayandri, MA  
Penguji III

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

23 Desember 2019



## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **"Peran Datuk Adat sebagai Hakam dalam Pencegahan Perceraian Suami Istri di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu"** yang ditulis oleh saudara :

Nama : Yulianti  
NIM : 21790225832  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 23 Desember 2019.

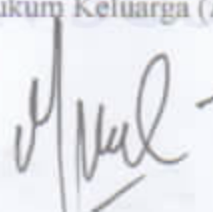
Penguji I  
**Dr. H. Zulkayandri, MA**  
NIP. 19710105 199503 1 002

  
Tgl. : 06 Januari 2020

Penguji II  
**Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA**  
NIP. 19540212 198103 1 007

Tgl. : 06 Januari 2020

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

  
**Dr. Junaidi Lubis, M. Ag**  
NIP. 19670822 199803 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau






## PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **"Peran Datuk Adat sebagai Hakam dalam Pencegahan Perceraian Suami Istri di Desa Muara Masu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu"** yang ditulis oleh saudara :


Nama : Yulianti  
NIM : 21790225832  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 23 Desember 2019.


Pembimbing I  
**Prof. Dr. Sudirman. M. Johan, MA**  
NIP. 19530518 198003 1 002

  
Tgl. : 06 Januari 2020

Pembimbing II  
**Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA**  
NIP. 19740704 200604 1 003

  
Tgl. : 06 Januari 2020

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

  
**Dr. Junaidi Lubis, M. Ag**  
NIP. 19670822 199803 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **"Peran Datuk Adat sebagai Hakam dalam Pencegahan Perceraian Suami Istri di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu"** yang ditulis oleh saudara :

Nama : Yulianti  
NIM : 21790225832  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, 06 Januari 2020  
Pembimbing I,

**Prof. Dr. H. Sudirman, M. Johan, MA**  
NIP. 19530518 198003 1 002

Tanggal, 06 Januari 2020  
Pembimbing II,

**Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA**  
NIP. 19740704 200604 1 003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

**Dr. Junaidd Lubis, M. Ag**  
NIP. 19670822 199803 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. H. SUDIRMAN, M. JOHAN, MA  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara  
Yulianti

Kepada Yth :  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di -  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Yulianti
NIM	: 21790225832
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Peran Datuk Adat sebagai Hakam dalam Pencegahan Perceraian Suami Istri di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Januari 2020  
Pembimbing I,

Prof. Dr. H. SUDIRMAN, M. JOHAN, MA  
NIP. 19530518 198003 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Dr. H. HELMI BASRI, Lc., MA**  
**DOSEN PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM**

**NOTA DINAS**

Perihal: Tesis Saudara  
**Yulianti**

Kepada Yth :  
 Direktur Program Pascasarjana  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Di -  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Yulianti
NIM	: 21790225832
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Peran Datuk Adat sebagai Hakam dalam Pencegahan Perceraian Suami Istri di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Januari 2020  
 Pembimbing II,

**Dr. H. HELMI BASRI, Lc., MA**  
 NIP. 19740704 200604 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulianti  
 Nim : 21790225832  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pasir Pinang, 10 Mei 1995  
 Program Studi : Hukum Islam  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul "Peran Datuk Adat dalam Pencegahan Perceraian Suami Istri di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu" sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh/sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2020



*Yulianti*

YULIANTI  
 NIM. 21790225832

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur hanya kepada Allah Swt. shalawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai manusia *rahmatan lil 'alamin*. Tesis berjudul **“PERAN DATUK ADAT SEBAGAI HAKAM DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN SUAMI ISTRI DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU”** ini, disusun dengan bantuan berbagai pihak.

Dengan telah menyelesaikan proposal tesis ini, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusun hingga terselesainya proposal ini yaitu kepada :

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, serta do'a. Ayahanda Hamdan, Ibunda Jalinar, Kakanda Masril, Budiman, Rita, Rika Mardila dan Adinda Harun Harasyid, Tarmizi, Panji Angga Saputra.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA RIAU.
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. Afrizal M, MA beserta seluruh jajaran yang telah membantu penulis dalam berbagai hal berkaitan dengan studi penulis di Program S2 ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M. Ag selaku ketua Prodi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah yang telah memberikan bimbingan nasehat terbaik selama perkuliahan.
5. Pembimbing Tesis, Bapak Prof. Dr. Sudirman. M. Johan, MA selaku pembimbing utama dan Dr. H. Helmi Basri, Lc. MA selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Pascasarjana yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan keilmuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan ini.
7. Kawan-kawan mahasiswa Program Pascasarjana angkatan tahun 2018 program studi hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga yang telah bersama berjuang dan memberikan dorongan terselesainya penulisan tesis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, dan akhirnya penulis hanya bisa berdoa mudah-mudahan semua kebaikan yang penulis dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Ilahi serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Aamiin.

Pekanbaru, Januari 2020  
Penulis

**YULIANTI**  
**NIM. 21790225832**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN KATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	13
1. Identifikasi Masalah .....	13
2. Batasan Masalah .....	14
3. Rumusan Masalah .....	14
C. Definisi Istilah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	17
E. Lokasi Penelitian .....	18
1. Gambaran Umum dan Sejarah Desa Muara Musu .....	18
2. Kesejahteraan Masyarakat.....	22
F. Penelitian Terdahulu .....	27
G. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. PERSENGKETAAN	
1. Pengertian Persengketaan.....	31
2. Cara Penyelesaian Sengketa .....	31
3. Bentuk-bentuk Konflik dalam Rumah Tangga.....	32
B. TINJAUAN TENTANG HAKAM DALAM HUKUM ISLAM	
1. Pengertian Hakam .....	36
2. Sejarah Hakam dalam Islam .....	39
3. Dasar Hukum tentang Penyelesaian Sengketa oleh Hakam .....	40
4. Syarat Menjadi Hakam dalam Penyelesaian Persengketaan ....	47
5. Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Konflik Rumahtangga ..	49



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. DATUK ADAT

1. Pengertian Datuk Adat .....	55
2. Hukum Adat Kabupaten Rokan Hulu.....	61
3. Sistem Kekerabatan Adat .....	65
4. Kewenangan Datuk Adat Secara Umum Dalam Masyarakat...	66
5. Gugurnya Jabatan Datuk Adat.....	76

D. PERCERAIAN DALAM ISLAM.....	78
--------------------------------	----

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	80
B. Pendekatan Penelitian .....	81
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	82
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	82
E. Sumber Data.....	84
F. Teknik Pengumpulan Data .....	85
G. Instrumen Pengumpulan Data .....	87
H. Teknik Analisis Data.....	89

## BAB IV ANALISIS

A. Peran Datuk Adat Sebagai Hakam dalam Penyelesaian Sengketa Rumah tangga di Desa Muara Musu .....	91
B. Pengaruh Peranan Datuk Adat dalam Pencegahan Perceraian.....	103
C. Analisis Hukum Islam terhadap Peran Datuk Adat sebagai Penengah Persengketaan .....	106
1. Peran Datuk Adat sebagai Hakam dilihat dari <i>Nash</i> .....	106
2. Kedudukan Datuk Adat sebagai Hakam dilihat dari Aspek <i>'Urf</i> .....	112
3. Peran Datuk Adat dilihat dari <i>Maqashid Syariah</i> .....	115

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	120
B. Saran.....	121

## DAFTAR PUSTAKA



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Rekapitulasi Peristiwa Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir Tahun 2019.....	6
Tabel 1.2	Perkara Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Berdasarkan Kecamatan.....	8
Tabel 1.3	Kondisi penduduk Desa Muara Musu berdasarkan umur dan jenis kelamin .....	21
Tabel 1.4	Tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu .....	21
Tabel 1.5	Mata pencaharian penduduk Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu .....	22
Tabel 1.6	Agama Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu .....	22
Tabel 1.7	Struktur organisasi pemerintahan Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu .....	25
Tabel 2.1	Datuk Adat Melayu Desa Muara Musu.....	59
Tabel 2.2	Pucuk Suku Melayu Kecamatan Rambah Hilir.....	61

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR SINGKATAN

NO	Singkatan	Kepanjangan dari Kata
1.	swt.	Subhanallahu wa Ta'ala
2.	saw.	Shallallahu 'Alaihi Wasallam
3.	As	'Alaihissalam
4.	Q.S.	al-Qur'an Surat
5.	h.	Halaman
6.	t. pn	Tanpa penerbit
7.	t. np	Tanpa tempat penerbit
8.	t.t	Tanpa tahun penerbit
9.	w.	Wafat
10.	H.R	Hadits Riwayat
11.	r.a	Radiya Allah 'Anhu



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam Tesis ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKM) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 054.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide To Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

No	Arab	Latin
1.	ا	Tidak dilambangkan
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Ts
5.	ج	J
6.	ح	H
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dz
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sy
14.	ص	Sh
15.	ض	Dh
16.	ط	Th
17.	ظ	Zh
18.	ع	,
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	ه	H
28.	ء	,
29.	ي	Y

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang	= a misalnya قَالِ menjadi <i>qala</i>
Vokal (i) panjang	= i misalnya قِيْلَ menjadi <i>qila</i>
Vokal (u) panjang	= u misalnya دُوْنُ menjadi <i>duna</i>

Khusus untuk bacaan *ya nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waw dan ya setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Contoh :

Diftong (aw)	= و	misalnya قَوْلٌ menjadi <i>qawlun</i>
Diftong (ay)	= ي	misalnya خَيْرٌ menjadi <i>khayrun</i>

## C. Ta’ Marbutah (ة)

*Ta’ marbutah* ditransliterasi dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaiyh*, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya زكاة المال ditulis *Zakat al-Mal*.

## D. Kata Sandang dan Lafazh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazd *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

- Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masya Allah kana wa ma lam yasha’ lam yakun.



## ABSTRAK

### **Yulianti (2019) :“ Peran Datuk Adat Sebagai Hakam dalam Pencegahan Perceraian Suami Istri di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)”**

Pernikahan adalah sarana terbaik menuju kehidupan yang bahagia karena masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa, kecintaan dan kasih sayang dapat tersalurkan. Namun kadangkala terjadi perselisihan antara suami dan istri, lalu kedua-keduanya sudah tidak menjalani tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran yang bisa saja berujung perceraian. Ditengah pertengkaran maka Islam menyuruh untuk mengutus hakam atau juru damai. Di Desa Muara Musu juru damai telah ditetapkan yaitu datuk adat. jika ditelusuri tidak jelas adanya hubungan kekeluargaan karena hanya mengandalkan satu suku. Datuk adat hanya menengahi pasangan yang saat menikah menggunakan adat. Penyelesaian datuk adat lebih dipilih masyarakat daripada ke Pengadilan Agama. Datuk adat bukan yang berpendidikan akademik secara formal, hanya masyarakat biasa. Peranan besar dalam Islam yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mempunyai kapasitas karena berpengaruh kepada perceraian dilakukan oleh datuk adat tersebut. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti Sejauh mana peran datuk adat dalam mendamaikan perselisihan suami istri dan apakah sudah mencapai hakam yang dimaksud di dalam hukum Islam. Untuk mendapatkan jawabannya maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Peran datuk adat sebagai hakam dalam masyarakat, Apa dampaknya terhadap angka perceraian, dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran datuk adat sebagai hakam dalam pencegahan perceraian di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Karna populasi sedikit langsung dijadikan sampel sebanyak 7 responden. Melalui observasi dan wawancara diperoleh jawaban-jawaban tentang bagaimana peran datuk adat sebagai hakam dalam pencegahan perceraian di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis meninjau dengan pandangan hukum Islam serta menampilkan dalil-dalil untuk mempertegas kesimpulan yang akan ditarik.

Adapun hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa datuk adat telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai hakam, terbukti dengan kehadiran datuk adat telah memperkecil angka perceraian, bahkan sangat jarang ditemukan pasangan yang bercerai setelah di selesaikan oleh datuk adat setempat. Namun dengan meninggalkan beberapa adat yang tidak sesuai. Seperti datuk adat harusnya menjadi hakam bagi semua pasangan suami istri, tidak bagi pasangan yang menikah menggunakan adat saja. Datuk adat belum mencapai tingkat hakam dalam hukum Islam. Datuk adat tidak boleh menyulitkan penyelesaian dengan menunggu pasangan membayar sanksi salah terlebih dahulu, karena itu bertentangan dengan kemashlahatan dan bertentangan dengan dalil-dalil serta kaidah-kaidah umum syari'at Islam. Oleh karena itu, adat-adat yang ada di dalam proses penyelesaian sengketa adat Melayu yang tidak sesuai syari'at mesti dihilangkan dan dilakukan perubahan kepada adat yang sesuai syari'at.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang





## ABSTRACT

Yulianti (2019): "The Role of Datuk Adat as Hakam in Prevention of Husband and Wife Divorce in the Muara Musu Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency)"

Marriage is the best means to a happy life because each husband and wife get peace of mind, love and affection can be channeled. But sometimes disputes occur between husband and wife, then both of them have not fulfilled their respective duties and obligations, so that what remains is only a fight that could have ended in divorce. Amid the quarrel, Islam ordered to send hakam or the peacemaker. In Muara Musu Village a peace interpreter has been established, namely the traditional datuk. if traced it is not clear whether or not there is a family relationship because it only relies on one tribe. Datuk adat only mediates when married couples use adat. the settlement of adat datuk preferred by the community than going to the Religious Courts. Datuk adat are not formally educated academically, only ordinary people. The big role in Islam that should be done by people who have the capacity is carried out by the traditional datuk. Therefore, the authors feel interested in examining the extent to which the role of custom datuk in reconciling husband and wife disputes and whether it has reached the hakam referred to in Islamic law. To get the answer, the following problem formulation was made: How is the role of custom datuk as hakam in the community, What is the impact of the role of adat datuk as hakam on divorce rates, and How is the analysis of Islamic law on the role of adat datuk as in Muara Musu Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency.

This research is a field research which is located in Muara Musu Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency. The data collection method in this research is through observation, interviews, literature study. Because the population is slightly directly sampled as many as 9 respondents. Through observations, interviews and questionnaires obtained answers about how the role of custom datuk as hakam in resolving disputes in Muara Musu Village, Rambah Hilir District, Rokan Hulu District, the authors review with the view of Islamic law and display the arguments to reinforce the conclusions to be drawn.

The results of this study found that the traditional datuk has succeeded in carrying out their duties as hakam, as evidenced by the presence of adat datuk has reduced the number of divorces, even very rarely found couples who divorced after being completed by the local adat datuk. But by leaving some customs that are not appropriate. Like the traditional datuk should be hakam for all married couples, not for married couples using adat only. Customary datuk has not yet reached the level of hakam in Islamic law. Customary datuk should not complicate the solution by waiting for the couple to pay the wrong sanction first, because it is contrary to the benefit and is contrary to the arguments and general rules of Islamic shari'ah. Therefore, the customs that are in the process of settling Malay custom disputes that are not in accordance with the shari'ah must be removed and changes to the customs that are in accordance with the Shari'ah.



## الملخص

يوليتي (٢٠١٩) : موقف رئيس الحكم في منع الطلاق في قرية موارا موسو رمباه هيلير منطقة

### مصوب راكم هولو

الزواج وسيلة الحياة السعيدة لأن هناك سكينة ومودة ورحمة بين الزوجين. ولكن في بعض الأحيان حدث شقاق بينهم بعدم تنفيذ الواجبة والحقوق بينهما. وهذا الشقاق قد يكون سببا للطلاق. فالإسلام يأمرنا أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها. والحكم في قرية موارا موسو هو رئيس القبيلة. وهذا الرئيس في الحقيقة ليس له نسب مع الزوجين. ورئيس القبيلة يحكم بين المتزوجين. ويرون أن الحكم من رئيس المفضل من قبل المجتمع من محكمة شرعية في تحليل المشكلة بين الزوجين، مع أن رئيسة القبيلة ليس من المتعلم جامعا بل مجتمع كما كان غيرهم. ورأت الباحثة أن الحكم في الإسلام لا بد ممن له العلم في هذه القضية. هذا هو الذي دفع الباحثة لبحث موقف رئيس القبيلة في تحليل شقاق بين الزوجين وهل موقفه يوافق موقف الحكم الذي قصده الإسلام. وتحديد المسألة في هذا البحث: ما موقف رئيس القبيلة في كونه حكما في المجتمع؟ وما تأثير الموقف على معدلات الطلاق في المجتمع؟ وما رأي الإسلام في موقف رئيس القبيلة في كونه حكما في قرية موارا موسو رمباه هيلير منطقة راكم هولو؟

هذا البحث بحث إجرائي في قرية موارا موسو رمباه هيلير منطقة راكم هولو. وجمع المعلومات من مناظرة والمقابلة والأسئلة والدراسة المكتبية. وعدد المثالي ٧ نفر. و من مناظرة والأسئلة والدراسة المكتبية حصلت الباحثة جوابا لموقف الحكم في تحليل شقاق بين الزوجين في قرية موارا موسو رمباه هيلير منطقة راكم هولو، والباحثة تقارن بين العادة والأحكام الشرعية باستخدام الأدلة الشرعية.

وبعد أن تم البحث يعرف أن رئيس القبيلة قد نجح في موقفه حكما لتحليل الشقاق بين الزوجين، بنظر إلى قلة الطلاق في قريته. ولكن بشرط أن يترك عادة غير مناسب كمثل تحليل شقاق في جميع المتزوجين الذين يتزوجون بغير العادة المحكمة في تلك القرية. ورئيس القبيلة في الحقيقة لم يقيم موقف الحكم في الإسلام. ولا يجوز له أن يشق على مجتمعه في تحليل الشقاق بدفع بعض الأموال مثلا، لأن هذا يخالف الأحكام الشرعية. لذلك كل عادة ملايو التي تخالف الأدلة والأحكام الشرعية في تحليل الشقاق بين الزوجين لابد أن يحذف ويغيره إلى ما يوافق الشرعية الإسلامية.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Adat atau kebiasaan merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat di dalam suatu daerah. Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir merupakan masyarakat bersuku melayu, memakai adat melayu yang masih dipertahankan hingga saat sekarang ini. Hukum adat yang berlaku di Kecamatan Rambah Hilir tidak diketahui lagi asal muasalunya karena telah dijalankan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu.

Seiring perkembangan zaman, maka tata cara adat yang tidak sesuai mulai ditinggalkan<sup>1</sup> seperti pepatah “*adat lama pusaka usang, nan basosok batang jerami nan batungguo ponotasan.*”<sup>2</sup> Adalah dua pepatah yang menunjukkan di Kecamatan Rambah Hilir sejak zaman nenek moyang dulu telah ada adat istiadat tersebut.

Adanya adat untuk memuat segala aturan dan norma yang akan dikawal oleh pejabat adat seperti datuk adat dan pucuk suku. Fungsinya untuk menciptakan kehidupan yang aman tentram, karena siapapun yang melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi adat. Masyarakat Desa Muara Musu sangat memegang penting sebuah adat, serta hidup dengan sosialisasi yang tinggi karena sadar akan pentingnya persaudaraan dalam suatu daerah.

<sup>1</sup> Buku Hasil Keputusan Musyawarah Besar ke VII Kecamatan Rambah Hilir. Merupakan buku pegangan datuk adat sesuai dengan hasil musyawarah besar. buku ini hanya dimiliki oleh perangkat adat se Kecamatan Rambah Hilir, baik itu pucuk suku dan datuk-datuk adat yang ada di daerah kewenangan Kecamatan Rambah Hilir. hlm.11

<sup>2</sup> Adat lama pusaka usang, berbentuk batang jerami yang hinggap di penetasan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat istiadat sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Karna masyarakat sebagai pemakai adat dengan segala aturan juga sanksi yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Fitrahnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain salah satu caranya yaitu dengan menikah. Pernikahan adalah sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab.<sup>4</sup> Tujuannya adalah memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan kesenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan.<sup>5</sup> Dengannya pula terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah,<sup>6</sup> tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>7</sup>

Pokok ketenangan rumah tangga adalah ketenangan dan ketentraman. Islam mengatur hubungan ini dengan segala perlindungannya yang menjamin ketentraman tersebut sehingga mencapai tingkatan taat yang tinggi.<sup>8</sup> Kenyataannya tidak mudah membina pernikahan yang bahagia. Kadangkala terjadi pertikaian antara suami dan istri, lalu kedua-keduanya sudah tidak

<sup>3</sup> Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 61

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Penerjemah Abu Sauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta Timur : Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 203

<sup>5</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat*, Alih Bahasa oleh Abdul Majid, (Jakarta : AMZAH, 2009), hlm. 36

<sup>6</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Alih Bahasa oleh Muhammad Abidun dkk, (Jakarta : Darul Fath, 2008), Juz II, hlm. 305

<sup>7</sup> Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang no 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan ; “Perkawinan adalah ikatan Lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*(*Khitbah, Nikah, dan Talak*), (Jakarta : Amzah, 2009), hlm. 251

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalani tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya.<sup>9</sup>

Percekcokan yang tajam dan terjadi terus menerus dikenal dengan istilah *syiqaq*. Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan permasalahan *syiqaq* dengan cukup lugas.<sup>10</sup> *Al-Syiqaq* berarti perselisihan yang berpotensi membuat dua pihak berpisah, dan ketakutan masing-masing pihak akan terjadinya perpisahan.<sup>11</sup>

Islam mengajarkan jika terjadi pertikaian antara suami-istri dan permusuhan antara keduanya semakin keras, lalu dikhawatirkan akan terjadi perceraian dan kehidupan keluarga itu semakin lemah, maka seseorang hakim akan mengutus dua orang juru damai atau hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri, untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi. Kedua juru damai bertugas untuk mencari kemaslahatan bagi pasangan suami istri. Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٥

<sup>9</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Ushratil Muslimat*, Alih Bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, Fiqh Keluarga, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 205

<sup>10</sup> *Al-Syiqaq* berasal dari bahasa Arab al-syaqqu yang berarti sisi. Adanya perselisihan suami istri disebut “sisi”, karena masing-masing pihak yang berselisih itu berada pada sisi yang berlainan, disebabkan adanya permusuhan dan pertentangan, sehingga padanan katanya adanya perselisihan (al-khilaf), perpecahan, permusuhan (*al-adawah*), pertentangan atau persengketaan. Lihat, Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 188

<sup>11</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Alih Bahasa oleh Badrun Abu Bakar dan Hery Nor Aly, (Semarang : Toha Putra, 1986), hlm. 42

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*<sup>12</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa jika ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Dalam konteks seperti ini maka mediasi atau penyelesaian konflik di antara keduanya menjadi wajib atau *fardhu* demi kemaslahatan antar suami istri. M. Yahya Harahap memberi sinonim "arbitor" yang sepadan dengan hakam.<sup>13</sup> Menurut Abu Al-Ainin Al-Fatah Muhammad pengertian tahkim menurut istilah fiqh adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian pihak yang bersengketa.<sup>14</sup>

Ulama telah bersepakat atas kebolehan mengirim juru damai atau dua hakam apabila terjadi perselisihan antara suami istri, tanpa diketahui keadaan keduanya dalam perselisihan tersebut, yaitu siapa yang benar dan siapa yang salah.<sup>15</sup> Bagi masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, yang menjadi juru damai adalah datuk adat. Datuk adat mempunyai peranan penting dalam pernikahan melayu, mulai dari lamaran hingga perceraian. Bagi masyarakat melayu, datuk adat adalah orang

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 84

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)*, (Jakarta : Pustaka Karini, 2007), hlm. 248

<sup>14</sup> Abu al-Ainin Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al-Hisbah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir : Dar al-Fikr, 1976), hlm. 84

<sup>15</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Muftahid Wa Nihayatul Muqdashid*, (Beirut : Dar Al-Jill, 1989), hlm. 74



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dituakan, sehingga semua masalah akan diselesaikan melalui datuk adat. Baik itu pencurian, berselisih paham antar tetangga, sengketa tanah, dan masalah-masalah lainnya.<sup>16</sup> Terlebih lagi masalah pernikahan, peran datuk adat begitu mendominasi. Adat perkawinan melayu sangat dipengaruhi oleh adat istiadat masa lalu yang digabungkan dengan budaya Islam.<sup>17</sup>

Adat melayu sangat diutamakan dan menjadi ukuran derajat seseorang. Orang yang tidak tahu adat atau kurang mengerti adat dianggap sangat memalukan dan dapat dikucilkan dari kelompok masyarakat.<sup>18</sup> Adapun suku dalam masyarakat Desa Muara Musu adalah suku *Ampu*, suku Melayu, suku *Pungkuik*, suku *Bonuo*, suku *Kandang Kopuh*, suku *Maih Moniliang*, dan suku *Kuti*.<sup>19</sup> Dalam tata penghidupan sehari-hari, datuk dinilai lebih dekat dan paham suka duka anak buahnya.<sup>20</sup> Penduduk merasakan datuk-datuk sebagai pelindung rakyat, menyelesaikan silang sengketa dan berbagai masalah lainnya.<sup>21</sup>

Bagi masyarakat Desa Muara Musu, setiap ada pertengkaran dan perselisihan suami istri, datuk adat yang akan berperan sebagai juru damai dari keduanya. Hal itu hanya dilakukan bagi pasangan suami istri yang waktu menikahnya menggunakan adat.

<sup>16</sup> Imam Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*, (Jakarta : Multi Kreasi Satudelapan, 2012), hlm. 53

<sup>17</sup> Tengku Dedy Ardiansyah, *Bersatulah Melayu*, (Bandung : Oxide Systems Indonesia, 2013), hlm. 3

<sup>18</sup> Eriyandi Budiman, *Upacara Adat Nusantara*, (Cirebon : CV. Gunung Djati, 2008), hlm. 14

<sup>19</sup> Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, *Potensi Budaya Rokan Hulu*, hlm. 49

<sup>20</sup> Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Proyek Pembangunan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah Tahun 2005, *Adat Perkawinan Lima Luhak di Kabupaten Rokan Hulu*, (Pasir Pengaraian, 2005), hlm. 4

<sup>21</sup> Mahidin Said, *Adat dan Kebudayaan Pasir Pengaraian Riau*, (Pekanbaru, 1998), hlm. 42



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas jumlah pernikahan di Kecamatan Rambah Hilir berdasarkan Rekapitulasi peristiwa nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Rambah Hilir tahun 2019 berjumlah 389 orang. 228 pasangan menikah di kantor KUA dan 161 menikah diluar KUA Kecamatan Rambah Hilir.<sup>22</sup>

Bagi pasangan suami istri yang menikah tidak menggunakan adat, jika dalam perjalanan pernikahannya ada masalah, maka datuk adat tidak menjadi penengah bagi keduanya. Menurut wawancara peneliti dengan salah satu datuk adat hal itu dikarenakan bahwa pasangan suami istri yang menikah tidak menggunakan adat dianggap tidak menghormati dan menghargai keberadaan datuk adat di daerahnya. Hal itulah yang menyebabkan datuk adat tidak memasuki urusan pernikahan jika ada masalah.<sup>23</sup>

Adapun yang menjadi perselisihan dalam rumah tangga yakni, masalah ekonomi, tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga yang menyebabkan percekocokan suami istri, suami atau istri melebihkan salah satu orang tua (perbedaan sikap kepada orang tua yang tidak adil), tidak kesesuaian pendapat antara suami istri, dan lainnya.

Sedangkan untuk perceraian di Kecamatan Rambah hilir berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama yang berlokasi di Pasir Pengaraian yaitu berjumlah 73.<sup>24</sup> Berikut merupakan tabel tentang jenis perkara lengkap dengan jumlah per kecamatan.

<sup>22</sup> Sumber Data : Rekapitulasi peristiwa nikah dari Kantor Urusan Agama ( KUA) Rambah Hilir Tahun 2019

<sup>23</sup> Nasir, Datuk Adat Suku Mais, *Wawancara*, Dusun Gelugur Indah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 17 April 2019

<sup>24</sup> Sumber Data : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data di atas menunjukkan terdapat 198 kasus cerai talak dan 535 kasus cerai gugat. Itu merupakan data masuk selama setahun di Pengadilan Agama untuk keseluruhan di Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan jumlah untuk Kecamatan Rambah Hilir terdapat 83 perkara. Perlu diketahui bahwa Kecamatan Rambah Hilir terdiri dari 15 desa, salah satunya Desa Muara Musu.<sup>25</sup> Dikarenakan di Desa Muara Musu penyelesaian sengketa dilakukan oleh datuk adat, maka masyarakat tidak berurusan ke Pengadilan Agama. Menurut datuk adat setempat bahwa pengurusan ke Pengadilan Agama hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang telah bercerai dan ingin menikah dengan orang lain yang bukan pasangan sebelumnya. Pengurusan ke Pengadilan tersebut di Muara Musu sangat jarang terjadi, karena yang melakukan pernikahan kedua kali merupakan seorang yang telah dewasa dan biasanya hanya menikah siri tanpa adanya surat perceraian dari Pengadilan Agama ataupun surat nikah yang kedua.<sup>26</sup>

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 menyatakan bahwa hakam berasal dari keluarga kedua belah pihak.<sup>27</sup> Begitu juga dalam Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa memeriksa saksi-saksi dari keluarga dekat dengan suami dan istri, setelah itu Pengadilan Agama

<sup>25</sup> Desa-desa di Kecamatan Rambah Hilir : Desa Rambah Hilir, Desa Rambah Hilir Tengah, Desa Rambah Hilir Timur, Desa Rambah, Desa Sei Dua Indah, Desa Serombou Indah, Desa Lubuk Kerapat, Desa Sei Sitolang, Desa Rambah Muda, Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya, Desa Muara Musu, Desa Sejati, Desa Surau Tinggi, Desa Tambak Jaya.

<sup>26</sup> Nasir, Datuk Adat Suku Mais, *Wawancara*, Dusun Gelugur Indah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 17 April 2019

<sup>27</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam ash-Shobuni*, Terj. Mu'ammal Hamidi, (Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1995), hlm. 1709

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain sebagai hakam.<sup>28</sup> Dasar dugaan yang kuat pihak keluarga yang menjadi hakam adalah lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga mengutus seorang hakam dari kedua belah pihak lebih diutamakan.

Secara filosofi mengangkat hakam dari pihak keluarga adalah mereka dianggap lebih tahu keadaan suami istri secara baik. Keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan percekocokan yang terjadi diantara keduanya sehingga peluang suami istri untuk menyampaikan uneg-unegnya dapat dilakukan tanpa banyak hambatan.<sup>29</sup> Namun dalam masyarakat Desa Muara Musu sudah ada sistem hukum yang menetapkan bahwa datuk adat yang akan menjalani peranan hakam untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Datuk adat pemimpin dalam suku masing-masing dan dianggap sebagai keluarga. Namun kenyataannya tidak demikian, datuk adat bukannya keluarga dari kedua belah pihak karena garis keturunan yang berbeda tapi masyarakat setempat percaya bahwa satu suku adalah keluarga. Jika ada keluarga sedarah yang paham agama, tetap persengketaan suami istri harus di selesaikan oleh datuk adat kedua belah pihak.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama menyatakan bahwa hakam adalah orang yang ditetapkan oleh Pengadilan dari pihak keluarga suami atau istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian

<sup>28</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta : 2008), hlm. 157

<sup>29</sup> Muhammad Saifullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*, (Semarang : 2002), hlm. 82

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselisihan terhadap *syiqaq*. Namun di Desa Muara Musu penyelesaian sengketa oleh datuk adat sebagai hakam bukanlah pilihan, tetapi sudah ditetapkan. Dan penyelesaian itu hanya dilakukan oleh datuk adat, tidak bisa digantikan dan tidak ditetapkan oleh Pengadilan.

Jika dilihat dalam hukum Islam, ahli fiqih menetapkan bahwa hakam hendaklah orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi dan mempunyai keahlian dalam bertindak sebagai hakam sampai mendapatkan hukum. Untuk itu seseorang haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain<sup>30</sup> : laki-laki yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya, sempurna pendengaran dan tidak bisu.

Syeikh Jalaluddin al-Mahally memberikan kriteria syarat-syarat seorang hakam, yaitu hakam itu merdeka, jujur serta punya pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.” Syarat yang perlu mendapat perhatian kita adalah syarat terakhir yakni punya pengetahuan tentang tugas-tugas hakam. Dari sini dapat dipahami bahwa hakam itu diutamakan seseorang yang memenuhi syarat, baik dari segi pengetahuan dan kemampuan sebagai hakam.<sup>31</sup> Hal ini berbeda dengan persyaratan dalam pemilihan datuk adat di Desa Muara Musu. Adapun pengangkatan datuk adat yaitu dengan bermusyawarah sesama suku untuk memilih datuk adat yang dirasa pantas,

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, alih Bahasa oleh Abdul Hayie dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 468

<sup>31</sup> Jalaluddin al-Mahally, *Qalyby Wa Umairah*, (Mesir : Daar al-Ihyaa’ al-Kutub al-‘arabiyah, tth), hlm. 307

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

garis keturunannya belum pernah menjadi datuk adat, dan cakap memimpin adat tersebut. Syarat pertama dalam memilih datuk adat yaitu :

1. Harus mengerti adat<sup>32</sup>
2. Mengerti *petitih petatah* adat<sup>33</sup>
3. (*Sorai buumpon, ayam buinuk*),<sup>34</sup> maksudnya adalah diperumpamakan pohon sereh bisa mengatur anak-anaknya yang banyak, ataupun induk ayam yang bisa mengatur anaknya dengan baik.
4. Dikenal bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Setelah terpilih datuk adat akan diresmikan dalam kerapatan adat serta di upah-upah.<sup>35</sup>

Mengingat bahwa hakam adalah penasehat sekaligus juru damai, maka tentulah yang menjadi hakam orang-orang yang ahli dibidangnya, sholeh dan mengerti cara penyelesaian masalah sesuai dengan landasan al-Qur'an. Datuk adat di Desa Muara Musu adalah orang-orang yang dituakan, dan bisa dikatakan bukanlah orang yang berpendidikan secara akademik melalui pendidikan formal, mereka hanyalah masyarakat awam yang mayoritas lulusan SD, orang yang disegani dan pandai dalam mengatasi masalah. Dari hasil wawancara penulis dengan ketujuh datuk adat mereka tidak tahu dengan istilah hakam dan ayat yang menjadi sumber hukum tentang hakam itu sendiri.

<sup>32</sup> Sudah lama berkecimpung dalam adat, sehingga tahu banyak tentang adat-adat yang berlaku.

<sup>33</sup> Mengerti pepatah-pepatah dan istilah-istilah adat, serta mengetahui makna yang terkandung dalam setiap adat yang akan dijalankan.

<sup>34</sup> Sereh yang banyak anaknya, induk ayam yang banyak anaknya.

<sup>35</sup> Upah-upah adalah kegiatan mengembalikan semangat atau tondi dalam diri seseorang atau beberapa orang melalui lantunan kata pemberi semangat dan nasihat. Lihat : Irwan Effendi dkk, *Upah-upah Tradisi Membangkit Semangat dalam Masyarakat Melayu*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2008), hlm. 3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena penyelesaian secara adat berlandaskan *sonang samung sonang* (senang sama senang) bagi suami istri.<sup>36</sup> Peranan besar yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mempunyai kapasitas dan berpengaruh besar terhadap perceraian antara suami istri tersebut dilakukan oleh datuk adat melayu secara mutlak. Untuk itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut lagi dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “PERAN DATUK ADAT SEBAGAI HAKAM DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN SUAMI ISTRI DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU”.

Adapun alasan pengambilan judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peran datuk adat dalam menjalankan tugasnya sebagai hakam. Sejauh mana peran datuk adat dalam mendamaikan perselisihan suami istri, apakah sudah mencapai hakam yang dimaksud di dalam hukum Islam dan dampaknya terhadap angka perceraian, Karena bagi masyarakat Muara Musu pendamai suami istri hanyalah datuk adat, dan masyarakat sangat menjunjung tinggi budaya adat yang telah berlaku secara turun temurun. Selain itu penyelesaian sengketa oleh datuk adat di Desa Muara Musu lebih dipilih oleh masyarakat daripada penyelesaian di Pengadilan Agama.

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> Tenas Effendy, *Pemimpin dalam Ungkapan Melayu*, (Selangor : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketokohnya dan peranan datuk adat sebagai orang yang dituakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat.
2. Peranan datuk adat secara umum di masyarakat dan peranan secara khusus di bidang hukum keluarga.
3. Sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh datuk adat dalam mengambil kebijakan terhadap masyarakat.
4. Dampak peran datuk adat sebagai hakim terhadap pencegahan perceraian.

#### 2. Batasan Masalah

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul seputar adat melayu, maka untuk lebih terarahnya penulis membatasi pada peran datuk adat sebagai hakim dalam pencegahan perceraian suami istri di masyarakat Melayu Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

#### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran datuk adat sebagai hakim dalam masyarakat di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Apa dampak peranan tersebut terhadap angka perceraian dalam masyarakat melayu Desa Muara Musu ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran datuk adat sebagai hakim dalam pencegahan perceraian suami istri di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami maksud dari judul karya ilmiah ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Peran

Kata peran menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia di artikan sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).<sup>37</sup>

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila diartikan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.<sup>38</sup>

Ada beberapa macam pengertian peran, yaitu :

Peran atau ikut serta pengertian yang berarti ikut serta ini adalah pengertian peran yang paling minimal. Ruang lingkup peran terdiri dari tiga hal yaitu :

- a. Peran yang meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.

<sup>37</sup> W.J.S Poerwadarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hlm. 53

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 212



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat di suatu organisasi.

Di dalam suatu peran terdapat dua macam harapan yaitu :

- a. Harapan-harapan yang dimiliki pemegang peran terhadap masyarakat atau orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.
- b. Harapan-harapan yang dimiliki masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.

#### 2. Datuk Adat

Datuk adalah gelar yang diberikan kepada sejumlah orang diberbagai kebudayaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan datuk adat. Gelar datuk diberikan kepada pemimpin sebuah suku di wilayah dengan populasi etnis melayu. Yang disebut orang melayu adalah orang yang memeluk agama Islam, berbahasa Melayu dan beradat istiadat Melayu. Melayu identik dengan Islam.<sup>39</sup>

#### 3. Hakam

Hakam adalah juru damai/penengah dalam perselisihan suami istri untuk mendamaikan keduanya.<sup>40</sup> Hakam menjalankan perselisihan suami-istri yang tak berhasil, yaitu setelah upaya suami menasehati istri,

<sup>39</sup> Suwardi, *Mengembalikan Kejayaan Melayu di Indragiri : Langkah Mempercepat Kesejahteraan Rakyat dalam Bingkai Otonomi Daerah*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), hlm. 25

<sup>40</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2002), hlm. 309

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memisahkan diri dari istri ditempat tidurnya, dan memukul istri (dengan pukulan ringan yang tidak menimbulkan bekas di badan).<sup>41</sup>

#### 4. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu sebagai padanan syariah (hukum yang diwahyukan Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber orosinil Hukum Islam) di satu sisi, dan sebagai padanan fikih (norma-norma hukum hasil olahan syariah oleh para ulama) di pihak lain.<sup>42</sup>

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran datuk adat sebagai hakam dalam masyarakat di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui dampak peranan tersebut terhadap angka perceraian dalam masyarakat melayu Desa Muara Musu.
- c. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap peran datuk adat sebagai hakam dalam pencegahan perceraian di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Magister Hukum pada program pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

<sup>41</sup> Elha Santoso, *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Dua, 2009), hlm. 203

<sup>42</sup> Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gema Media, 2001), hlm. 13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian Fiqh sebagai suatu topik spesifik pada Hukum Keluarga Islam.
- Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Pascasarjana secara khusus dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

### E. Lokasi Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Sejarah Desa Muara Musu

Desa Muara Musu adalah sebuah desa yang sudah ada sejak lama dibawah pengelolaan pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di Kecamatan Rambah Hilir. Muara Musu merupakan sebuah kampung atau dusun dimana ditengah kampung tersebut dialiri sebuah sungai dan bermuara ke sungai Rokan (Batang Lubuh) sehingga dari nama sungai tersebut menjadi nama kampung atau nama Desa Muara Musu.<sup>43</sup>

Menurut cerita terdahulu, nama Muara Musu berasal dari Musuh. Pada zaman dahulu sekelompok orang yang tinggal di kampung tersebut berkelahi didalam sungai dan berteriak ada musuh. Perkataan musuh lama kelamaan menjadi kata musu. Adanya sungai yang bermuara di sungai Rokan jadilah namanya Desa Muara Musu.

Desa Muara Musu merupakan sebuah desa pemekaran dari Desa Rambah Hilir Tengah. Para pemuka-pemuka masyarakat, agama dan tokoh pemuda bermusyawarah untuk pemekaran desa tersebut dan membuahkan sebuah kesepakatan menjadi dua desa, yaitu Desa Rambah Hilir Tengah yang beribukota di Aur Betung dan Desa Muara Musu yang beribukota di

<sup>43</sup>Buku Profil Desa Muara Musu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muara Musu.<sup>44</sup> Pada tahun 2002, Desa Muara Musu resmi menjadi desa yang terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Muara Musu Barat, Dusun Muara Musu Timur dan Pasir Pinang. Pada akhirnya, Desa Muara Musu mekar menjadi 6 (enam) dusun. Adapun ke 6 (enam) dusun tersebut, yaitu :

- a. Dusun Sei. Mojai
- b. Dusun Muara Musu
- c. Dusun Gelugur Indah
- d. Dusun Pasir Pinang
- e. Dusun Sosial 70
- f. Dusun Muara Musu Timur

Pada awal berdiri desa ini yang memimpin disebut kepala desa. Sejak berdirinya Desa Muara Musu sampai sekarang dipimpin oleh 4 (empat) orang kepala desa, yaitu :

- a. Wali Salim (2002-2007)
- b. Wali Darwis (2007-2012)
- c. Wali Amri (2012-2017)
- d. Wali Amri (2017 - sekarang)

Setiap dusun di Desa Muara Musu juga dipimpin oleh seorang kepala dusun yang dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh warga setiap dusunnya secara demokrasi. Adapun nama dusun dan kepala dusun yang menjabat sekarang yaitu :

- a. Dusun Sei. Mojai : Musa

---

<sup>44</sup>*Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dusun Muara Musu : Aris Sugianto
- c. Dusun Gelugur Indah : Liwaul Hamdi
- d. Dusun Pasir Pinang : Syamsul Jamal
- e. Dusun Sosial 70 : Suhairi
- f. Dusun Muara Musu Timur : Umrizal<sup>45</sup>

**2. Gambaran Umum Data Aspek Geografi dan Demografi Desa Muara Musu**

Geografi adalah ilmu tentang bumi yang meliputi luas wilayah permukaan, iklim penduduk, flora, fauna dan sebagainya.<sup>46</sup> Aspek geografi adalah aspek-aspek yang mengkaji tentang bumi yang meliputi luas wilayah permukaan, iklim penduduk, flora, fauna dan sebagainya. Luas wilayah Desa Muara Musu lebih kurang 1120 Ha. Jarak Desa Muara Musu dari pusat Pemerintahan Kecamatan Rambah Hilir lebih kurang 2 KM, jarak dari Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang 16 KM dan jarak dari Ibu Kota Provinsi lebih kurang 200 KM.<sup>47</sup> Adapun mengenai batas wilayah Desa Muara Musu adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rambah Hilir Tengah
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rambah Hilir/ Desa Sejati
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rambah Muda/ Desa Sei. Sitolang

<sup>45</sup> Ermanita Erlis, Kasi Pelayanan Kantor Desa Muara Musu, *Wawancara*, 17 April 2019

<sup>46</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 467

<sup>47</sup> Rokan Hulu Regency, Riau – Indonesia, Kabupaten Rokan Hulu Negeri Seribu Suluk, hlm. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei. Dua Indah<sup>48</sup>

Untuk mengetahui kondisi penduduk Desa Muara Musu dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Kondisi Penduduk Desa Muara Musu Berdasarkan**  
**Umur Dan Jenis Kelamin**

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4 tahun	116	113	229
2	5-9 tahun	97	127	224
3	10-19 tahun	120	125	245
4	20-29 tahun	145	192	337
5	30-39 tahun	127	119	246
6	40-49 tahun	128	239	367
7	50-59 tahun	397	560	957
8	60 tahun keatas	57	59	116
<b>Jumlah</b>		<b>1187</b>	<b>1534</b>	<b>2721</b>

Sumber: Statistik kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir, tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah penduduk Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah 2.271 jiwa dengan laki-laki berjumlah 1.187 jiwa dan perempuan berjumlah 1.534 jiwa.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Muara Musu**  
**Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S1-S3)	68 orang
2	Diploma (D1-D2)	130 orang
3	SLTA/ Sederajat	671 orang
4	SLTP/ Sederajat	464 orang
5	SD	754 orang
6	PAUD	137 orang
<b>Jumlah</b>		<b>2224 orang</b>

Sumber data : Statistik kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir, tahun 2019

<sup>48</sup> Sumber Data: kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Muara Musu yang menuntut ilmu dari tingkat PAUD sampai Universitas.

**Tabel 1.3**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Muara Musu**  
**Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	TNI	2 orang
2	Bidan	3 orang
3	PNS	25 orang
4	Swasta	20 orang
5	Nelayan	7 orang
6	Pedagang	40 orang
7	Petani	314 orang
8	Jasa	9 orang
<b>Jumlah</b>		<b>420 orang</b>

*Sumber data : Statistik kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir, tahun 2019*

Data di atas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Desa Muara Musu dalam memenuhi Kebutuhan hidupnya banyak yang bertani, yaitu sebanyak 314 orang, sedangkan yang sedikit ditemui di desa ini adalah bidan dan TNI (Tentara Nasional Indonesia).<sup>49</sup>

**Tabel 1.4**  
**Agama Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir**

No	Agama	Jumlah	Ket.
1	Islam	2.721	100%
2	Lainnya	-	

*Sumber data : Statistik kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir, tahun 2019*

**3. Kesejahteraan Masyarakat**

**a. Pendidikan**

Pendidikan adalah proses pengubahan berpikir atau tingkah laku dengan cara pengajaran, peyuluhan dan latihan; proses mendidik.

<sup>49</sup> Sumber data : kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan merupakan tolak ukur untuk menentukan maju atau tidaknya suatu masyarakat.<sup>50</sup> Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin tinggi pula kemajuan dan kesejahteraan yang ada di daerah tersebut, begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin rendah pula tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang ada di daerah tersebut. Tingkat pendidikan yang dimiliki suatu masyarakat sangat menentukan terhadap lajunya arus perkembangan pembangunan dan pendidikan yang memadai akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan selain sumber daya alam. Untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dibutuhkan sarana pendidikan.

Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Muara Musu yaitu PAUD, SDN, MDTA Swasta, SMAN/SLTA. Pendidikan pada tingkat SLTP, masyarakat menyekolahkan anaknya keluar Desa, yaitu di Desa Muara Rumbai, Desa Rambah Hilir Tengah dan desa-desa yang terdekat. Pendidikan diploma dan Sarjana masyarakat mengantarkan anaknya ke Kabupaten Rokan Hulu khususnya Pasir Pengaraian bahkan sampai ke Ibu Kota Provinsi yaitu Pekanbaru.

**b. Agama**

Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, sifat-sifat serta kekuasaan-Nya dengan ajaran dan kewajiban-kewajiban yang

---

<sup>50</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus., hlm. 353

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan kepercayaan itu.<sup>51</sup> Agama merupakan salah satu yang memberikan arahan dan makna bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Penduduk yang ada di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu 100% beragama Islam.

Pemahaman dan pengamalan agama cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan terdapatnya masjid di setiap dusun sebagai tempat ibadah dan kegiatan lainnya yang bersifat keagamaan. Disamping itu, masyarakat juga aktif dalam kajian-kajian Islam seperti majlis ta'lim dan wirid yasinan pada setiap minggu dan diadakan pada dusun masing-masing. Kajian-kajian Islam dilakukan secara rutin untuk menambah ilmu keagamaan dan membuka cakrawala berfikir yang selama ini tertutup dan membenarkan pendapatnya sendiri serta taqlid secara membabi buta. Suasana kehidupan dalam menjalankan syari'at Islam berjalan dengan baik dan tidak ada keributan karena masalah perbedaan menjalankan syari'at Islam.<sup>52</sup>

**c. Adat dan Budaya**

Adat istiadat adalah kumpulan kebiasaan yang telah dijadikan peraturan, hukum, norma-norma dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat. Jika ada salah satu dari anggota kelompok melanggar peraturan maka dia akan dikenakan sanksi oleh masyarakat. Sanksi dapat berupa denda berbentuk uang didasarkan kurs mata uang *riya* dan ada pula yang berbentuk mempersembahkan sirih

<sup>51</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus., hlm. 18

<sup>52</sup> Amat Ghazali (Imam masjid Dusun Sei. Mojai), *Wawancara*, Desa Muara Musu, tanggal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setepak dan saling bermaaf-maafan. Demikian halnya dalam masyarakat Rambah Hilir pada khususnya memiliki adai istiadat tersendiri.<sup>53</sup>

Hukum adat yang berlaku di Kecamatan Rambah Hilir pada zaman penjajahan dulu sudah barang tentu tidakkan lepas dari pengaruh penjajah. Tetapi setelah mendapatkan kemerdekaan maka tata cara adat yang diaturkan penjajah pun ditinggalkan.

#### 4. Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintahan Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tidaklah jauh berbeda dengan desa-desa lainnya.

**Tabel 1.5**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Musu**  
**Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Amri	Kepala Desa	Honor
2	Zainal Asrol	Sekretaris Desa	Honor
3	Dasuki Rohimi	Kasi Pemerintahan	Honor
4	Nazaruddin	Kasi Kesejahteraan	Honor
5	Ermanita Erlis	Kasi Pelayanan	Honor
6	Edi Junidi	Kaur TU dan Umum	Honor
7	Syamsul Jamal	Kaur Keuangan	Honor
8	Amrizal	Kaur Perencanaan	Honor
7	Musa	Kepala Dusun Sei. Mojai	
8	Aris Sugianto	Kepala Dusun Muara Musu	
9	Umrizal	Kepala Dusun Muara Musu Timur	
10	Suhairi	Kepala Dusun Sosial 70	
11	Liwaul Hamidi	Kepala Dusun gelugur Indah	
12	Syamsul Jamal	Kepala Dusun Pasir Pinang	

*Sumber data : Kantor Kepala Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2019*

<sup>53</sup> Buku Hasil Keputusan Musyawarah Besar ke VII Kecamatan Rambah Hilir. Merupakan buku pegangan datuk adat sesuai dengan hasil musyawarah besar. buku ini hanya dimiliki oleh perangkat adat se Kecamatan Rambah Hilir, baik itu pucuk suku dan datuk-datuk adat yang ada di daerah kewenangan Kecamatan Rambah Hilir. hlm. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun uraian tugas dari perangkat desa adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala desa mempunyai tugas dalam mengkoordinir semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kepala desa dalam melakukan pekerjaannya bertanggung jawab kepada camat.
- 2) Sekretaris merupakan wakil dari kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam administrasi pemerintahan desa.
- 3) Kepala seksi (Kasi) pemerintahan mempunyai tugas pokok dalam urusan administrasi dalam bidang pemerintahan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.
- 4) Kepala Seksi (Kasi) kesejahteraan mempunyai tugas pokok dalam urusan kesejahteraan masyarakat dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberi.
- 5) Kepala Seksi (Kasi) pelayanan mempunyai tugas pokok dalam urusan pelayanan masyarakat dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberi.
- 6) Kepala urusan (Kaur) tata usaha dan umum mempunyai tugas pokok dalam urusan tata usaha dan umum ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.
- 7) Kepala urusan (Kaur) keuangan mempunyai tugas pokok dalam urusan bidang keuangan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.
- 8) Kepala urusan (Kaur) perencanaan mempunyai tugas pokok dalam urusan perencanaan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi. Kepala Dusun merupakan wakil dari kepala desa di setiap



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dusun. Kepala dusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa dalam urusan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat dusun masing-masing.<sup>54</sup>

### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu peneliti menemukan kemiripan judul seperti judul penelitian ini. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian serta menentukan orisinalitas pokok pembahasan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu, yang terkait dengan penelitian yang peneliti ajukan.

*Pertama*, Herlambang dalam jurnalnya yang berjudul “Membangun Asas-asas Peradilan Adat (Studi Pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu) menyimpulkan bahwa masyarakat suku bangsa Rejang dan masyarakat melayu di provinsi Bengkulu sejak lama telah melaksanakan proses penyelesaian sengketa dengan prinsip musyawarah. Musyawarah adat terbukti berhasil menyelesaikan konflik secara cepat, murah, dan keadilan kedua belah pihak.<sup>55</sup>

*Kedua*, Merliansyah dalam Tesisnya yang berjudul Pengangkatan Hakam (Juru Damai) dalam Perkara Perceraian sebagai Upaya Perdamaian di

<sup>54</sup> Sumber data : kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019

<sup>55</sup> Herlambang, *Jurnal*, Membangun Asas-asas Peradilan Adat (Studi pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Kelas I A Palembang menyimpulkan bahwa akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama apabila tidak melakukan upaya perdamaian dalam perkara perceraian maka setiap pemeriksaan perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum dilakukan usaha mendamaikan secara optimal, pemeriksaan dan putusannya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Banding karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara.<sup>56</sup>

*Ketiga*, Irfan dalam jurnalnya yang berjudul Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (*Syiqaq*) dalam Peradilan Agama menyimpulkan bahwa hakam atau juru damai yang diangkat dari kedua belah pihak memiliki kewenangan terbatas dalam kasus *syiqaq*. Kewenangan hakam selaku juru damai dalam penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas memberikan usulan pendapat dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan kepada hakim.<sup>57</sup>

Di atas adalah beberapa contoh karya ilmiah yang berhubungan dengan judul peneliti yaitu sama-sama tentang hakam. Adapun judul tentang hakam ini sudah banyak yang menelitinya, baik itu bersifat kepustakaan (*library research*) ataupun bersifat lapangan (*field research*). Namun yang meneliti tentang peran adat sebagai hakam dalam pernikahan melayu sepengetahuan penulis belum ada yang menelitinya. Bahkan setelah peneliti

<sup>56</sup> Merliansyah, *Tesis* : Pengangkatan Hakam (Juru Damai) dalam Perkara Perceraian sebagai Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang

<sup>57</sup> Irfan, *Jurnal* : Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (*Syiqaq*) dalam Peradilan Agama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telusuri, peneliti tidak menemukan jurnal atau buku yang langsung membahas tentang judul ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, di mana setiap bab berisi sub-sub pembahasan, yaitu :

**Bab 1** : Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, definisi istilah, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Secara esensial, yang dibicarakan dalam bab ini adalah Peran datuk adat dalam pernikahan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam.

**Bab II** : Bab kedua adalah tinjauan teoritis tentang persengketaan, adat melayu, dan hakam dalam Islam secara mendetil karna pokok penelitian ini adalah tentang hakam. Dimulai dengan Persengketaan serta menghadirkan hakam yang dijelaskan menurut hukum Islam. datuk adat dan hukum adat di Desa Muara Musu. Pembahasan dalam bab ini juga memuat tentang pengertian datuk adat, hukum adat Rokan Hulu, kewenangan datuk adat, serta peran secara umum dan secara khusus.

**Bab III** : Bab ketiga adalah metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, seperti jenis penelitian, tempat dan waktu

penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV : Bab keempat adalah inti dari penelitian yang berisi analisis menurut hukum Islam terhadap peran adat sebagai hakam dalam pencegahan perceraian dan disusun secara sistematis.

Bab V : Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun seputar masalah yang dibahas.

Daftar Kepustakaan berisi tentang literatur-literatur yang dijadikan sumber rujukan dalam memaparkan dan menunjang teori yang berhubungan dengan topik bahasan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. PERSENGKETAAN

### 1. Pengertian Persengketaan

Pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti “pertentangan atau konflik”, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi terhadap satu objek permasalahan.<sup>58</sup> Senada dengan hal tersebut, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.<sup>59</sup>

Dari pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu yang melanggarnya.

### 2. Cara Penyelesaian Sengketa

Pada umumnya di dalam kehidupan suatu masyarakat telah mempunyai cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa sendiri, yakni proses penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat melalui cara-cara formal maupun informal. Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi

<sup>58</sup>W.J.S Poerwadarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hlm. 78

<sup>59</sup> Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h. 74

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adjudikasi<sup>60</sup> yang terdiri atas proses melalui pengadilan dan arbitrase<sup>61</sup>, serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negoisasi<sup>62</sup> dan mediasi<sup>63</sup>.

### 3. Bentuk-bentuk Konflik dalam Rumah Tangga

Adapun bentuk-bentuk konflik dalam rumah tangga yang bisa menghancurkan bahtera kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut.<sup>64</sup>

Konflik antara suami dan istri seringkali dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah antara suami dan istri belum terjalin visi yang jelas. Biasanya, istri selalu meminta sang suami untuk menuruti setiap kehendaknya. Namun ironisnya, sang istri selalu menolak apa yang diperintahkan suami terhadapnya. Kesalahan inilah yang berujung pada perbuatan *nusyuz*, yaitu durhakanya istri terhadap suami atau sebaliknya yaitu durhakanya suami terhadap istri.

#### 1) Istri tidak memenuhi kewajiban suami

Standar utama mencapai keharmonisan dan cinta kasih serta sayang adalah kepatuhan istri dalam rumah tangganya. Dalam hal ini seorang istri harus mentaati perintah dari seorang suami, asalkan perintah tersebut

<sup>60</sup> Adjudikasi adalah salah satu cara penyelesaian konflik atau sengketa melalui pihak ketiga yang mana pihak ketiga ini ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat mengikat.

<sup>61</sup> Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri persengketaan mereka dankedua belah pihak akan mentaati penyelesaian oleh hakam yang mereka tunjuk. Lihat Johari dan Yusliati, *Arbitrase Syariah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2013), hlm.15

<sup>62</sup> Negoisasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Negoisasi juga diartikan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal.

<sup>63</sup> Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

<sup>64</sup> Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h. 76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak melenceng dari jalan Islam.<sup>65</sup> Adapun yang termasuk istri tidak memenuhi kewajiban suami adalah :

- a) Meninggalkan berhias dihadapan suami, sedangkan suami menginginkannya (tidak berpenampilan menarik). Suami akan merasakan tidak nyaman jika istrinya tidak berpenampilan menarik, dengan baju dan badan yang kotor karena belum mandi sehingga muncul bau badan yang kurang sedap. Ini juga menjadi salah satu penyebab suami gampang berpaling ke wanita lain, yang membuatnya lebih nyaman dan senang di sampingnya. Wajah yang enak dipandang merupakan magnet utama kenyamanan lawan jenis. Wajah ceria dan penuh senyum sangatlah penting pada saat menyambut teman-temannya, keluarganya dan khususnya ketika berinteraksi dengan suami. Bahkan senyum seorang istri terhadap suami dan orang lain adalah termasuk ibadah.<sup>66</sup>
- b) Tidak memuaskan hasrat seksual suami (melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilannya. Seks adalah kebutuhan pria dan wanita, karena itu mereka (para istri) adalah pakaian bagi kamu (suami) dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.<sup>67</sup> Hubungan seks dalam rumah tangga ternyata bukan sebatas sarana melainkan sebagai suatu tujuan. Terpenting yang harus dijaga oleh perempuan agar kepuasan seks suaminya tetap terjaga. Dari ungkapan itu istri wajib

<sup>65</sup> Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta : Kata Hati, 2005), hlm. 87

<sup>66</sup> Fatimah Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, (Bandung : Cendekiawan, 1999), hlm. 236

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. I*, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), hlm. 384

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memuaskan seks suami selagi masih dalam batas-batas kewajiban dan tidak menyalahi hukum syariat Islam. Istri wajib memenuhi tugas seksualnya terhadap suami. Istri tidak boleh menolak kecuali karena alasan-alasan yang dapat diterima atau dilarang hukum.

- c) Keluar dari rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak syar'i. Keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suami walaupun untuk menjenguk orang tua adalah merupakan kedurhakaan istri terhadap suami, karena hal itu bisa menyebabkan kerusakan dan kehancuran rumah tangga.
  - d) Tidak mampu mengatur keuangan. Disamping istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, istri juga wajib memelihara harta suaminya. Dengan kata lain tidak boros, berlaku hemat demi masa depan anak-anaknya dan belanja secukupnya tidak hura-hura. Kalau istri boros, itu merupakan kesalahan istri dalam mengatur keuangan keluarga, karena hal itu sama halnya dengan seorang istri yang tidak dapat menjaga harta kekayaan suami yang dipercayakan kepadanya. Bila hal ini dilakukan terus maka akan mengakibatkan munculnya keretakan dalam rumah tangga.
  - e) Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya seperti : shalat, puasa ramadhan, dan zakat serta kewajiban yang lain.<sup>68</sup>
- Dalam rumah tangga tidak hanya istri yang selalu memenuhi kewajibannya sebagai istri, suami pun harus memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istri. Karena kedua belah pihak sudah melakukan

<sup>68</sup> Salih Bin Ghonim as-Sadlan, *Kesalahan-kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), hlm. 236



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikatan pernikahan. Maka keduanya harus menjalankan kewajibannya masing-masing.<sup>69</sup> Seharusnya tidak langsung boleh menyalahkan seorang istri yang telah berkhianat dengan berlaku serong bersama laki-laki. Tidak boleh juga menyalahkan suami karena penganggurannya dan tidak mau berusaha sungguh-sungguh.

#### 2. Suami tidak memenuhi kewajiban

Adapun hal yang termasuk suami tidak memenuhi kewajiban terhadap istri adalah sebagai berikut :<sup>70</sup>

- a) Ketidakmampuan suami menafkahi keluarganya. Setiap suami harus memahami bahwa istri adalah amanah yang dibebankan dipundak suami dan merupakan keharusan baginya untuk memberikan nafkah sejauh kemampuannya. Suami harus memberikan nafkah lahir batin pada istrinya dengan kemampuannya, suami memberi makan, minum serta pakaian dan menggaulinya dengan sebaik mungkin dan dengan kemampuannya asalkan tidak mendzolimi istrinya.<sup>71</sup> Dalam hal ini, posisi suami termasuk lemah dalam menafkahi istrinya.<sup>72</sup>
- b) Suami tidak pengertian kepada istri, banyak sang suami yang tidak mengetahui gangguan-gangguan kodrati yang dialami istri, seperti sedang hamil, nifas, haid dan lain-lain.<sup>73</sup>

<sup>69</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 5

<sup>70</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung : Sinar Baru Algasindo, 2013), hlm. 398

<sup>71</sup> Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), hlm. 20

<sup>72</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 1996), hlm. 432

<sup>73</sup> Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, *Kesalahan-kesalahan Suami*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004), hlm. 76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## B. HAKAM

### 1. Pengertian Hakam

Istilah hakam berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hakamu* yang menurut bahasa berarti wasit atau juru penengah, dan dalam kata *al-hakamu* identik dengan kata *al-faishal*. Dalam kamus bahasa Indonesia hakam berarti perantara, pemisah, wasit.<sup>74</sup>

Secara bahasa kata hakam asal maknanya مَنَعَ مَنَعًا لِإِصْلَاحٍ “mencegah sesuatu perbuatan untuk islah (kemaslahatan). Hakam dapat juga diartikan “ketentuan”<sup>75</sup>. Menurut istilah hakam diartikan “orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan dua orang yang berselisih paham.”<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, 2003), hlm. 383

<sup>75</sup> Al-Mu’jam *al-Wajiz*, (Mesir : Majma’ al-Lughah al-Arabiyah, 1994), hlm. 165

<sup>76</sup> Sa’dy Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhy Lughatan Wa Iistilahan*, (Suriyah : Dar al-Fikr, 1949), hlm. 96

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang pengertian hakam, banyak para tokoh Islam yang mendefinisikannya, diantaranya Ahmad Mustafa al-Maraghi mengartikan hakam dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.<sup>77</sup> Menurut Hamka, pengertian hakam yaitu penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.<sup>78</sup> Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.<sup>79</sup> Dalam fikih munakahat terdapat definisi bahwa hakam adalah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.<sup>80</sup>

Sementara dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dalam penjelasannya pada Pasal 76 ayat (2) diberikan keterangan batasan pengertian hakam dengan kalimat yang jelas : “hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.”<sup>81</sup>

Begitu juga Moerza Muntanhari mengemukakan kata sepadan hakam dengan arbiter. Menurut beliau hakam dipilih dari keluarga suami istri. Satu

<sup>77</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Alih bahasa oleh Bahrin Abu Bakar dan Henry Nur Aly, (Semarang : Toha Putra, 1988), Juz V, hlm. 40

<sup>78</sup> Hamka, *Tafsir Al- Izhari*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2005), Juz V, hlm. 68

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm. 195

<sup>80</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 189

<sup>81</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang dari pihak keluarga suami dan satu pihak dari keluarga istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri sehingga suami istri lebih terbuka dalam mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.<sup>82</sup>

Istilah hakam dan berbagai bentuknya, menurut Sukmadjaja Asy'ary dan Rosy Yusuf dijelaskan di dalam tujuh ayat.<sup>83</sup> Sedangkan ayat yang terkait langsung dengan kata hakam adalah surat an-Nisa ayat 35. Allah berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*<sup>84</sup> (QS. An-Nisa : 35)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa hakam adalah seorang utusan atau delegasi dari pihak suami istri, yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Dalam kamus Munjid disebutkan bahwa, "arbitrase" dapat disepadankan dengan istilah "*tahkim*". Tahkim sendiri berasal dari kata

<sup>82</sup> Ahmad Ruslan, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, (Pustaka : Bandung, 1985), hlm. 243

<sup>83</sup> Sukmadjaja Asy'ary dan Rosy Yusuf, *Indeks al-Qur'an*, (Bandung : Pustaka, 2006), hlm. 61. Ketujuh surat yang dimaksud adalah surat An-Nisa ayat 35, 60, 65, surat al-Maidah ayat 43, surat al-An'am ayat 114, surat al-A'raf ayat 87, surat Yunus ayat 109, surat Hud ayat 45, surat Yusuf ayat 80.

<sup>84</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Mekar, 2004), hlm. 406



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*hakkama*”.<sup>85</sup> Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.<sup>86</sup> Sedangkan orang yang menyelesaikan disebut “hakam”.

Pengertian “tahkim” menurut kelompok ahli hukum mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum.<sup>87</sup>

## 2. Sejarah Asal Mula Hakam dalam Islam

Dalam sejarah dicatat sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, ia sebagai juru damai perselisihan dalam masyarakat Mekkah. Pada mulanya Nabi Muhammad bertindak sebagai hakim tunggal. Beliau memberikan wewenang kepada sahabat untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan sengketa antara sahabat lain yang mendapatkan kepercayaan dari Nabi ialah Abi Syuraiyh. Beliau telah menjadikan tahkim sebagai upaya menyelesaikan persengketaan.

Nabi Muhammad sendiri pernah menjadi hakam dalam kejadian peletakan hajar aswad. Dimana masing-masing merasa paling pantas untuk meletakkan batu tersebut, dan Nabi Muhammad hadir sebagai penengah sehingga persengketaan bisa diselesaikan.<sup>88</sup>

<sup>85</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)*, (Jakarta : Pustaka Karini, 2007), hlm. 248

<sup>86</sup> Liwis Ma'luf, *Al-Munjid al-Lughah Wa al-A'lam*, (Beirut : Daar al-Masyriq, tth), hlm. 146

<sup>87</sup> Said Agil Husein al-Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta : BMI, 1994), hlm. 48-49

<sup>88</sup> Kasus Hajar Aswad dimuat dalam kisah-kisah Nabi Muhammad, di antaranya dalam Muhammad Husein Hackal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 1995), hlm. 69

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peristiwa tahkim juga terjadi dalam sejarah perang shiffin. Dalam kejadian ini Abu Musa al-Asy'ari merupakan perwakilan dan juri bagi pasukan Kufah (pasukan imam Ali as) dan Amru bin 'Ash merupakan perwakilan dari pihak pasukan Syam (pasukan Muawiyah). Kedua perwakilan ini melakukan perundingan untuk menyelesaikan perbedaan antara kaum muslimin satu dengan lainnya dan kedua sepakat memberi pendapat sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits.

### 3. Dasar Hukum Hakam

Adapun dasar-dasar hukum tentang hakam terdapat dalam beberapa sumber, yaitu sumber al-Qur'an dan al-Hadits :

#### a. Al-Qur'an

Dasar hukum hakam ialah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya : *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*<sup>89</sup>(Q.S. An-Nisaa : 35).

Ayat di atas menyimpulkan bahwa, jika terjadi persengketaan antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1999), hlm. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ayat sebelumnya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki. Kedua hakim itu dikirim oleh yang berwajib atau pilihan suami istri, atau oleh keluarga suami istri. Dua orang hakim itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain.<sup>90</sup> Dalam ayat tersebut juga diisyaratkan bahwa dua orang hakim mengetahui masalah privat pasangan suami istri, karena dekatnya hubungan dengan mereka sehingga dapat ikut dalam membantu penyelesaian masalah.<sup>91</sup>

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : *"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."*<sup>92</sup>(Q.S. Al-Hujurat : 9-10).

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana solusi apabila terdapat perselisihan antara suami istri, yaitu dengan mengutus juru damai (hakam) baik dari pihak suami maupun pihak istri. Di mana ayat disyaratkan bahwa apapun yang terjadi antara suami istri meskipun diduga

<sup>90</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, (Beirut : Dr al-Kutub al-Ilmiah, 9494), hlm. 118

<sup>91</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi juz V*, (Mesir : Mustafa al-Babi Al-Habibi, 1934), hlm. 47

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1999), hlm. 2516

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak akan dapat diatasi pada dasarnya lahir akibat hal-hal yang mudah diatasi oleh dua orang hakam yang mengetahui tentang rahasia jiwa pasangan.<sup>93</sup>

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٤

Artinya : *"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar."*<sup>94</sup> (Q.S. An-Nisa : 114).

Maksud ayat di atas, menurut Syeikh Abbdul Hamid Muhammad Ghanam, jika seorang muslim mendapatkan dua orang saudaranya yang saling berseteru, maka hendaknya hakam datang kepada suami dengan kabar gembira, demikian juga hakam menceritakan kepada istri dengan kabar kebaikan, supaya hati mereka berdua (suami istri) dapat menyatu.<sup>95</sup>

#### b. Hadits

Hadits yang menjelaskan tentang sengketa suami istri dan hakam adalah sebagai berikut :

<sup>93</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi (Jilid V)*, Terjemahan K.Anshor Umar, (Semarang : Toha Putra, 1988), hlm. 50

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1999), hlm. 135

<sup>95</sup> Syeikh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargaku ke Surga : Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Di Atas Titian Manhaj Rasulullah*, (Jakarta : Mirqat Media Grafika, 2007), hlm. 42



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ بَارَكَ وَتَعَالَى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا). إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةُ وَالْإِجْتِمَاعَ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا يَنْ الرَّجُلُ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ وَالْإِجْتِمَاعِ.

Artinya : "Mengabarkan kepadaku Yahya dari Malik menyampaikan 'Ali bin Abi Thalib pernah berkata tentang kedua hakam yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Qur'an. (Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal). Sesungguhnya kedua orang itu (kedua hakam) boleh memisahkan dan boleh mempersatukan, Malik mengatakan itulah pendapat yang paling bagus dari ahli ilmu yaitu bahwa kedua hakam boleh mengatakan kepada suami istri untuk berpisah atau bersatu.<sup>96</sup>

#### 4. Pengangkatan Hakam

Secara umum, pengangkatan atau penunjukkan hakam yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Filosofi mengangkat hakam dari pihak keluarga adalah mereka dianggap lebih tahu keadaan suami istri secara baik. Keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan perpecahan yang terjadi diantara keduanya sehingga peluang suami istri untuk menyampaikan uneg-unegnya dapat dilakukan tanpa banyak hambatan.<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, (Syiria : Rishalah Publisher, 2013), hlm. 450-451

<sup>97</sup> Muhammad Saifullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*. Penelitian Individual, tidak diterbitkan, (Semarang : IAIN Walisongo, 2002), hlm. 82

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 76 ayat 2 pada kalimat “dapat” mengangkat hakam, ini berarti pengangkatan hakam tergantung pada pendapat atau penilaian hakim. Sekalipun ada permintaan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak, semuanya tergantung pada pendapat atau penilaian hakim atas permasalahan mana yang lebih mendatangkan maslahat dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika Islah atau damai dapat diperkirakan bisa lebih mudah dicapai melalui hakam, kemungkinan pengangkatan hakam bisa berubah menjadi wajib.

Adapun hukum pengangkatan hakam (juru damai) dalam masalah kasus menurut Imam Asy-Syaukani adalah wajib. Sebab pengutusan hakam dalam kasus *syiqaq* dalam rangka membasmi kelaliman antara suami istri. Dalam perspektif fiqih, hukum mengangkat hakam ini para ulama berbeda pendapat dalam memahami bentuk *amr* dari ayat, sehingga ada yang mengatakan hukum mengangkat hakam adalah wajib sebagaimana dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan alasan menghilangkan penganiyaan itu termasuk kewajiban umum bagi penguasaan terutama pengadilan.<sup>98</sup> Yang perlu diperhatikan sebelum mengangkat hakam adalah siapa yang berhak mengangkat hakam tersebut, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang mengangkat hakam.<sup>99</sup>

- a. Tentang siapa yang menjadi hakam, ada 2 macam yaitu hakam yang berasal dari masing-masing keluarga suami istri dan hakam dari orang lain. Adanya

<sup>98</sup> Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Rawa'iul Bayan Tafsir Ayat Ahkm Min Al-Qur'an*, (tt. Th), Juz 1, hlm. 472

<sup>99</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 308

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dua macam hakam dalam ini tidak terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama, yaitu sebagai berikut :

1. Tentang hakam dari pihak keluarga. Hal ini memang tertera secara jelas di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 35.<sup>100</sup> Diantara para ulama yang mengikuti pendapat ini adalah Umar Az-Zamakhsari, dia berpendapat bahwa juru damai harus terdiri dari keluarga masing-masing pihak suami dan istri. Dengan alasan :

*Pertama*, keluarga kedua belah pihak tahu tentang keadaan suami secara mendalam dan mendekati kebenaran.

*Kedua*, bahwa keluarga kedua belah pihak adalah diantara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kedamaian serta kebahagiaan kedua suami istri tersebut.

*Ketiga*, bahwa mereka yang lebih dipercaya oleh kedua suami istri yang sedang berselisih.

*Keempat*, bahwa kepada mereka kedua suami istri akan leluasa untuk berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing.<sup>101</sup>

2. Pendapat kedua yang menyatakan hakam boleh dari pihak luar keluarga suami istri diantaranya yaitu Syihabuddin Mahmud Al-Alusi. Ia berpendapat bahwa hakam boleh saja diambil dari luar keluarga kedua belah pihak. Dalam pandangannya hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam kasus *syiqaq*, sebab

<sup>100</sup> Kama Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 190

<sup>101</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Usratil Muslimat*, alih bahasa oleh : M. Abdul Ghoffar, Fikih Keluarga, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 203

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pokok dari pengutusan hakam adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak. Namun demikian, keluarga dekat atas dasar dugaan yang kuat lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga menurut Al-Alusi, mengutus juru damai dari keluarga kedua belah pihak yang sedang berselisih tetap lebih dianjurkan dan lebih diutamakan.<sup>102</sup>

- b. Tentang siapa yang berhak mengangkat hakam juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqih, yaitu hakam yang diangkat oleh masing-masing pihak suami istri dan hakam yang diangkat oleh hakim atau pemerintah atau yang lebih dikenal dengan istilah *min jihad al-hakim*.

1. Pendapat yang mengatakan bahwa hakam diangkat oleh masing-masing pihak suami istri diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul qodim* nya dan sebagian pengikut Imam Hanbali, mereka beralasan bahwa ayat 35 surat an-Nisa ditujukan kepada pihak-pihak suami dan pihak-pihak istri.<sup>103</sup>

2. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hakam diangkat oleh hakim atau pemerintah adalah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* nya, sebagian yang lain dari pengikut Imam Hanbali, Al-

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1994), hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sya'bi dan Ibnu Abbas, dengan alasan bahwa lafadz *fab'asu* pada ayat 35 surat an-Nisa ditujukan kepada seluruh kaum muslimin.<sup>104</sup>

### 5. Syarat-syarat Hakam

Kemudian tentang persyaratan untuk dapat dijadikan hakam terdapat beberapa pendapat diantaranya yaitu Sayyid Sabiq. Ia menyatakan bahwa seorang hakam disyaratkan harus orang-orang yang berakal, baligh, adil, dan muslim.<sup>105</sup> Hakam harus dua orang laki-laki yang adil dan ahli dengan perkara yang dibebankan kepada keduanya.<sup>106</sup> Sedangkan syarat menjadi hakam yang disepakati oleh ulama fikih adalah :

1. Islam, kedua hakam tersebut harus beragama Islam, tidak boleh hakam tersebut selain Islam.
2. Berakal, tidak sah apabila hakam tersebut memutuskan dalam keadaan gila.
3. Telah mencapai usia dewasa, karena hakam membutuhkan penalaran untuk menentukan perkara tersebut dipisah atau disatukan.
4. Adil yaitu dapat menjaga agama dan melaksanakan amanat.<sup>107</sup>

Syeikh Jalaluddin al-Mahally memberikan kriteria syarat-syarat seorang hakam, yaitu hakam itu merdeka, jujur serta punya pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Syarat yang perlu mendapat perhatian adalah syarat terakhir yakni punya pengetahuan tentang tugas-tugas hakam.

Dari sini dapat dipahami bahwa hakam itu diutamakan seseorang yang

<sup>104</sup> Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1978), hlm. 37

<sup>105</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Abidun, dkk, (Jakarta : Darul Fath, 2008), hlm. 61

<sup>106</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayie dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 458

<sup>107</sup> Abdul Shomad, penormaan, hlm. 319

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi syarat, baik dari segi pengetahuan dan kemampuan sebagai hakam.<sup>108</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa *hakamaini* adalah profesional, dua orang laki-laki yang adil dan mengedepankan upaya damai.<sup>109</sup> Persyaratan profesional seorang hakam dimaksudkan agar di dalam menangani kasus-kasus berat seperti *syiqaq* dapat mengatasinya dengan cepat, tepat dan baik. Menurut Imam Nawawi bahwa seorang hakam harus laki-laki cakap dan soleh. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan yang terjadi antara suami dan istri dapat didamaikan (*islah*).

Syarat laki-laki dimaksudkan agar seorang hakam tegar dalam mengkaji, menyelidiki, serta menyelesaikan perkara tersebut. Persyaratan adil dimaksudkan agar hakam yang menangani masalah *syiqaq* benar-benar memahami masalahnya untuk mempertimbangkan hasil akhirnya, bercerai atau meneruskan rumahtangganya sehingga keadilan dirasakan juga oleh mereka yang sedang bercekcok. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا  
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah

<sup>108</sup> Jalaluddin al-Mahally, *Qalyby Wa Umairah*, (Mesir : Daar al-Ihyaa’ al-Kutub al-‘arabiyah, tth), hlm. 307

<sup>109</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beirut : Dar el-Fikr, 1989), hlm. 527

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>110</sup>(Q.S. Al-Maidah : 8).

Dalam ayat di atas, telah diterangkan bahwa dalam menegakkan kebenaran harus adil. Syarat hakam selanjutnya mampu mengedepankan perdamaian. Hakam bertugas menyelesaikan masalah bukan justru dengan hadirnya hakam akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu hakam harus mendahulukan upaya damai di antara pihak yang bersengketa.

Orang yang ditunjuk sebagai hakam hendaklah :<sup>111</sup>

- a) Berlaku adil di antara para pihak yang bersengketa.
- b) Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas.
- c) Disegani oleh kedua pihak suami istri.
- d) Hendaklah berpihak kepada orang yang teraniaya, apabila pihak lain tidak mau berdamai.

#### 6. Fungsi Hakam dalam Mendamaikan Konflik Rumah Tangga

Hakam harus mempunyai sifat jujur, bijaksana, mempunyai kompetensi di bidangnya, dan sifat lain yang mendukungnya. Hakam sebagai khalifah yang menjalankan fungsinya di bidang peradilan sebagaimana hakim. Tugas hakam harus sesuai dengan peraturan dan perundangan Allah SWT.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥

Artinya :”Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang

<sup>110</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Mekar, 2004), hlm. 108

<sup>111</sup> Tihami, Fikih Munakahat : *Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hlm. 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.* ”<sup>112</sup>(Q.S. An-nisa : 65).

وَأَنِ احْكُم بِمَا أُنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أُنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya :”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”<sup>113</sup>(Q.S. Al-Maidah : 49).

Selain terdapat persamaan, ada juga perbedaan dalam menjalankan tugas dan fungsi antara keduanya. Hakam berperan hanya bersifat memberikan bantuan, nasehat mengenai perkara yang ditanganinya. Adapun hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sekedar menetapkan hukum yang ada, tapi juga melakukan analisis masalah dalam kasus yang tidak didapati hukumnya, ia dapat menetapkan hukum berdasarkan ijtihad sesuai dengan keinginan dan keadilannya.<sup>114</sup>

Berdasarkan tugas hakam itulah, ia dapat menjalankan fungsinya sebagai hakam dalam memberikan bantuan hukum, nasihat hukum, arbitrase untuk melakukan *islah*. Fungsi hakam berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa agar masalah dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Ia

<sup>112</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Mekar, 2004), hlm. 88

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 172

<sup>114</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib dengan judul “*Fikih Sunnah*” Juz VIII, Cet. Ke-V, (Bandung : Al-Ma’rif, 1987), hlm. 88



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus berusaha agar perkara yang disengketakan oleh masing-masing pihak dapat diselesaikan. Dengan demikian, seorang hakam dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya haruslah selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien, terhadap pengadilan, diri sendiri, dan terhadap negara untuk menegakkan keberadaan dan keadilan.

Fungsi hakam terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah hakam berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara suami istri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai disitu. Hakam tidak memiliki hak untuk mengambil putusan.

Tugas utama hakam ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat yang menimbulkan krisis itu. Mencari sebab musabbab menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami istri itu. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas perkara kedua hakam ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus *syiqaq* ini bersifat ba'in, artinya suami istri tersebut hanya dapat kembali melalui akad nikah yang baru.<sup>115</sup>

Apabila karena sesuatu hal, hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk hakam lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal dengan sebuah Badan Penasehat Perkawinan dan

<sup>115</sup> Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Asy-Syifa, 1992), hlm. 168

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (arbitrator) untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat calon suami istri yang merencanakan perkawinan.

Apabila diperhatikan dalam hukum Islam tentang kedudukan hakam, ternyata para ahli fiqih masih terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Menurut Abu Hanifah berpendapat, dan sebagian dari pengikut Imam Hambali, Asy-Syafi'i, ulama-ulama Dhahiri, Syi'ah Zaidiyah mengatakan bahwa kedudukan hakam sebagai wakil. Oleh karena itu, sebagai wakil maka hakam tidak boleh menceraikan atau menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari yang diwakili yaitu suami istri.<sup>116</sup> Keterangan ini bersumber dari riwayat Al-Hasan dan Zaid bin Sulaiman.<sup>117</sup>

Pendapat ini beralasan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyerahkan kepada kedua hakam, melainkan hanya untuk mendamaikan, sebagaimana dikatakan. Jika mereka berdua itu menghendaki "*ishlah*". Ini menunjukkan bahwa di luar tugas ini adalah tidak ada. Keduanya adalah berstatus sebagai wakil, sehingga mereka tidak mungkin berhak melaksanakan keputusannya, melainkan harus kerelaan yang memberi wakil.<sup>118</sup>

2. Menurut pendapat Imam Malik dan sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *Qaul Jadid* imam Syafi'i, mengatakan bahwa itu berarti hakim, sebagai

<sup>116</sup> Ny. Soemiati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta, Liberty, 2007), Cet. VI, hlm. 112

<sup>117</sup> Muhammad Ali Ash-Shobuniy, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Al-Qur'an*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamdy dan Imron Al-Manan, (Surabaya : Bina Ilmu, 1985), Cet. Ke-1, hlm. 412

<sup>118</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim maka boleh memberi keputusan untuk menceraikan istri itu atau berusaha mendamaikan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari suami istri.<sup>119</sup>

Adapun alasan pendapat di atas yaitu sesungguhnya Allah swt. Memberi predikat kedua hakam sebagai hakim (orang yang menjadi hakim), yaitu sebagaimana dikatakan “*dan utuslah seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri*”. Hakam adalah juga hakim, sedang salah satu wewenang hakim ialah menghukumi, tanpa menunggu kerelaan dihukumi.<sup>120</sup>

Pendapat tersebut di atas sejalan dengan pendapat Ali bin Abi Thalib Ibnu Abbas, Abu Salamah bin Abdur Rahman, Sya’bi Nakha’i, Sa’id bin Jubair, dan Ibnu Mundzir sebagaimana dinukilkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya bahwa hakam sebagai wasit wajib berusaha menciptakan kebaikan dan kelanggenan kehidupan rumah tangga atau mengakhiri perpecahan tanpa lebih dahulu memerlukan persetujuan atau pemberi kuasa dari suami istri yang bersangkutan.<sup>121</sup>

Al-Jashshas mengatakan bahwa kedua hakam tidak ada hak untuk menceraikan, kecuali dengan kerelaan suami, sebab sudah tidak ada perselisihan lagi bahwa suami kalau sudah mengaku bersalah terhadap istrinya, tidak boleh diceraikan antara keduanya itu, dan hakim pun tidak boleh memaksa suami supaya menceraikan istrinya, sebelum ada keputusan dari dua hakam.<sup>122</sup>

<sup>119</sup> Ny. Soemiati, Hukum, hlm. 112

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 125

<sup>121</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib dengan judul “*Fikih Sunnah*” Juz VIII, Cet. Ke-V, (Bandung : Al-Ma’rif, 1987), hlm. 90

<sup>122</sup> Ash-Shobuniy, Rawa’iyul, hlm. 412

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ath-Thobari mengatakan bahwa hakam tidak boleh menjatuhkan hukum untuk menceraikan suami istri, mengambil harta, kecuali dengan kerelaan pihak yang bersangkutan.<sup>123</sup> Berdasarkan keterangan yang telah di himpun, maka diketahui bahwa para ahli ulama berbeda pendapat dalam memahami kedudukan hakam dan tujuan hakam dalam gugatan perceraian atas dasar alasan *syiqaq*. Sebagian berpendapat bahwa hakam itu hanya sebagai wakil, maka dari itu tujuan hakam hanyalah bertugas untuk mendamaikan suami istri itu dan tidak berwenang untuk memutuskan perceraian, sebagian lainnya mengatakan bahwa kedudukan hakam adalah bertugas untuk mendamaikan sekaligus berhak untuk memutuskan perceraian atas alasan *syiqaq*.

Adapun mengenai jumlah hakam dalam ilmu fiqih dikenal istilah “*Hakamain*” (dua hakam), dalam kata bentuk tausiyah, guna merujuk jumlah hakam dalam perkara *syiqaq*. Hal ini dapat dipahami jika kita menelaah anak kalimat “*hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi*” dalam surat an-Nisa ayat 35. Berdasarkan surat tersebut jumlah hakam setidaknya dua orang, dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama tentang masalah jumlah hakam diatur dalam pasal 72 ayat 2.

“Dapat mengangkat seorang hakam atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam”.

Dengan demikian, jumlah hakam minimal dua orang, seorang dari masing-masing pihak atau pihak lain, atau lebih sehingga terdapat perbedaan dengan pendapat ahli fiqih. Secara historis, jumlah hakam memang bisa satu,

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 125



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Meskipun sebaiknya ditunjuk beberapa orang, namun secara kasuistik mungkin lebih tepat ditunjuk satu orang saja. Terkadang, semakin banyak orang yang ikut campur tangan, semakin kacau permasalahan. Dalam hal-hal tertentu, upaya menjajaki usaha penyelesaian sengketa mungkin lebih efektif dilakukan oleh seorang saja. Kecuali jika hakim mempunyai kewenangan untuk mengambil putusan, kita anggap anggotanya harus mutlak harus terdiri dari beberapa orang, guna menghindari kekeliruan maupun berat sebelah.

## 1. Pengertian Datuk Adat

Datuk adalah gelar panggilan untuk orang yang memegang jabatan dalam adat, apabila seseorang telah dilantik menjabat gelar datuk dalam suku, maka haruslah gelar tersebut disebut dan tidak boleh dipanggil namanya, apabila dalam prosesi acara adat berlangsung ada orang yang memanggil namanya maka ia akan dikenai *salah borutang*<sup>127</sup> (melakukan kesalahan menurut adat)

69

127 Salah berhutang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan harus membayar hutang tersebut, karena memanggil seseorang dengan gelar datuknya berarti ia telah menghormati orang tersebut. Gelar datuk diberikan kepada pemimpin sebuah suku di wilayah dengan populasi etnis melayu.

Datuk berbeda dengan datu, karena datu adalah dukun perempuan yang telah tua, seorang perempuan yang ahli dalam perkara obat-obatan, merupakan gelar untuk ahli obat yang telah hebat dan terkenal, bagi laki-laki disebut dengan *bomou*. Seorang yang telah bergelar datu biasanya menjadi orang yang sangat diandalkan di suatu negeri dan menjadi orang kepercayaan dalam pekerjaan untuk mengobati raja dan keluarganya.<sup>128</sup>

Sedangkan adat adalah tata urutan dalam kehidupan sosial masyarakat melayu yang dipegang kuat, dipertahankan, selalu dilakukan dan dipraktikkan sehingga menjadi kebiasaan yang telah mentradisi dalam suatu daerah.

Tersebutlah dalam pepatahnya “*iduik dikandung adat, mati dikandung bumi*.”<sup>129</sup>.

<sup>128</sup> Junaidi Syam bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, *Tombo Rokan*, (Pasar Pengaraian : Yayasan Garasibumy, 2007), hlm. 226

<sup>129</sup> Hidup dikandung adat, mati dikandung bumi. Maksudnya adalah manusia yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat haruslah ia memakai dan menggunakan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut, keharusan itu diibaratkan sebagaimana manusia mati haruslah dikuburkan. Pertama kali orang mulai menggunakan adat adalah ketika mereka telah mengenal pentingnya tata aturan, penghormatan, pemujaan pada sang penguasa alam, perayaan-perayaan ketika mendapat kebahagiaan sukacita, memecahkan masalah, dan lain-lain. Cikal bakal adat tersebut terbentuk dikarenakan adanya sistem kepemimpinan dalam suatu kelompok masyarakat yang menginginkan keteraturan dalam kelompoknya. Adat yang dipegang dan dipakai oleh bangsa melayu dianggap sebagai pusaka turun temurun yang sudah tidak diketahui dengan pasti kapan adat itu bermula, namun demikian tetap terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan pada zamannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi datuk adat adalah lelaki yang diangkat oleh sukunya untuk mengurus anak kemenakan, diberi gelar pusaka yang turun temurun dalam sukunya.<sup>130</sup>

Gelar datuk dalam adat ini harus diberikan kepada orang yang tepat menurut alur garis keturunannya, menurut kepercayaan apabila diserahkan pada orang yang salah maka akan menyebabkan orang yang menerima gelar tersebut tertimpa penyakit, menjadi sakit-sakitan atau menerima musibah-musibah yang tidak diketahui penyebabnya. Orang-orang di dalam setiap suku dinamakan *urang posukuan*<sup>131</sup>.

Suku sering dikaitkan dengan matrilineal dan patrilineal. Matrilineal berasal dari dua kata bahasa latin yaitu *mater* yang berarti ibu, dan *linea* yang berarti garis.<sup>132</sup> Jadi matrilineal berarti menurunkan waris suku mengikut alur pihak ibu.<sup>133</sup> Satu suku disebut sebagai keluarga atau kerabat, kekerabatan tidak hanya berdasarkan keturunan tetapi juga ikatan pernikahan.<sup>134</sup>

Datuk adat sebagai pemelihara dan pengawal jalannya sebuah adat yang berlaku disuatu daerah. Adat istiadat adalah kumpulan kebiasaan yang telah dijadikan peraturan, hukum, norma-norma dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat.<sup>135</sup> Jika ada salah satu anggota

<sup>130</sup> Junaidi Syam Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, *Trombo Rokan*, (Pasar Pengaraian, Yayasan Garasibumy, 2007), hlm. 11

<sup>131</sup> Orang pesukuan

<sup>132</sup> Suharto dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, ( Semarang : Widya Karya, 2014), hlm. 214

<sup>133</sup> Junaidi Syam, *Teromba Tambusai*, (Pasar Pengaraian : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu), hlm. 154

<sup>134</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm. 75

<sup>135</sup> Ismail Hamkaz dan Zailendra, *LUHAK KEPENUHAN : dalam Bingkai Berita antara Konsep, Realita, dan Agenda untuk Indonesia*, (Pasar Pengaraian : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, 2014), hlm. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok masyarakat tersebut yang melanggar peraturan, hukum, norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam adat istiadat tersebut maka dia akan dikenakan sanksi oleh masyarakat sesuai dengan peraturan, hukum, atau norma yang telah dilanggar.<sup>136</sup>

Sanksi atau hukum tersebut dapat berupa denda, ada yang berbentuk uang yang di dasarkan kurs mata uang *riya*<sup>137</sup>, dan ada pula yang berbentuk mempersembahkan sirih setepak saling bermaaf-maafan. Demikian halnya dalam masyarakat Rambah Hilir pada umumnya, dan masyarakat Desa Muara Musu khususnya memiliki adat istiadat tersendiri.<sup>138</sup> Sebelum Islam masuk dan dipeluk oleh orang melayu, segala peraturan adat mengikut aturan yang ada menurut nenek moyangnya sesuai dengan pepatah adat “*adat basondi aluo, aluo basondi ko non patuik*”.<sup>139</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah satu datuk adat menyatakan bahwa yang dapat menjadi datuk adat adalah menurut *lega* (giliran), berdasarkan *puak* (lubuk) di daerah tesebut. Contohnya datuk adat suku *Bonuo* bapak Sujang Neka, jika dia sudah tua atau uzur dan berhenti menjadi datuk adat maka keturunannya tidak boleh jadi datuk adat, tetapi dicari orang lain dari suku yang sama (*Bonuo*) dengan syarat garis keturunan orang itu belum pernah

<sup>136</sup> Buku Hasil Keputusan Musyawarah Besar ke VII Kecamatan Rambah Hilir. Merupakan buku pegangan datuk adat sesuai dengan hasil musyawarah besar. buku ini hanya dimiliki oleh perangkat adat se Kecamatan Rambah Hilir, baik itu pucuk suku dan datuk-datuk adat yang ada di daerah kewenangan Kecamatan Rambah Hilir. hlm. 5

<sup>137</sup> *Riya* adalah istilah sanksi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan kesalahan kepada datuk adat. Biasanya dinyatakan dalam jumlah angka sesuai dengan adat yang berlaku di desa Muara Musu. 1 *riya* : Rp. 3000,-

<sup>138</sup> M. Nasir, Datuk Adat Suku Mais Monilieng, *Wawancara*, Dusun Muara Musu Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 03 September 2019

<sup>139</sup> Adat bersendi alur, alur bersendi pada yang patut-patut. Lihat : Junaidi Syam Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, *Trombo Rokan*, (Pasir Pengaraian, Yayasan Garasibumy, 2007), hlm. 319



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi datuk adat sebelumnya. Tentunya dengan syarat yang telah ditentukan oleh kerapatan adat Melayu Kecamatan Rambah Hilir. Adapun tahap awal, datuk adat memang tidak mengerti secara langsung tentang pekerjaannya sendiri. Untuk itulah kerapatan adat mengharuskan datuk adat adalah orang yang sering hadir pada acara-acara supaya dapat belajar dan mengerti tentang tugasnya dari datuk-datuk adat lain yang sudah berpengalaman. Jadi setelah menjadi datuk adat, saat itulah belajar dan paham dengan melihat tugas pada acara kenduri, timbun tanah, dan acara lainnya. Datuk adat dan *niniekmamak* adalah orang yang sama. Disamping sebagai datuk adat, ia juga sebagai *niniekmamak*. Perbedaannya adalah, panggilan *niniekmamak* hanya digunakan dalam kata sambutan pidato saja. Seperti :”Yang kami hormati ninikmamak, cerdik pandai, serta aparat pemerintah”. Sedangkan datuk adat dipakai untuk panggilan keseharian dan juga dalam acara beradat lainnya. Istilah datuk adat lebih umum dan lebih sering dipakai dalam keseharian adat melayu di Desa Muara Musu. Adapun yang menjabat sebagai datuk adat di Desa Muara Musu adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.1**  
**DATUK ADAT MELAYU**  
**DESA MUARA MUSU**

No.	Nama Datuk Adat	Nama Sukong	Nama Suku (Suku Nun 7)	Suku
1.	Ruslan	Armi	Suku Melayu	<b>M E L A Y U</b>
2.	M. Nasir	Edo	Suku <i>Maih Monilieng</i>	
3.	Kaharuddin	Ipul	Suku <i>Ampu</i>	
4.	Abdul Rahim	Mak’e	Suku <i>Kandang Kopuh</i>	
5.	Itam	Tuah	Suku <i>Pungkuik</i>	
6.	Sudirman	Ijas	Suku <i>Kuti</i>	
7.	Sujang Neka	Leman	Suku <i>Bonuo</i>	

Sumber : Hasil wawancara dengan datuk adat bapak Sujang Neka.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan tugasnya, datuk adat dapat digantikan oleh *sukongnya*. *Sukong* merupakan istilah yang dipakai masyarakat untuk wakil dari sebuah jabatan adat. Jika diibaratkan dalam sebuah pemerintahan, *sukong* sama seperti wakil-wakil pada aparat lainnya. Contohnya wakil bupati yang bertugas menggantikan bupati ketika berhalangan dalam menjalankan tugasnya. *Sukong* juga bertugas menggantikan datuk adat jika berhalangan untuk menghadiri suatu acara. Nyatanya *sukong* tidak begitu diperlukan di masyarakat, karena mayoritas datuk adat masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam masyarakat Melayu Desa Muara Musu, jabatan adat tertinggi dipegang oleh pucuk suku. Sebagaimana datuk adat, pucuk suku juga mempunyai *sukong*. Jika datuk adat punya kewenangan di suatu desa, berbeda halnya dengan pucuk suku. Mereka mempunyai kewenangan lebih luas yakni se-Kecamatan Rambah Hilir.<sup>140</sup>

Jika dilihat dari segi hukum, penyelesaian datuk adat seperti Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya lebih kecil, sedangkan penyelesaian oleh pucuk suku diibaratkan seperti Pengadilan Tinggi Agama yang cakupan wilayah hukumnya jauh lebih luas. Untuk urusan yang menyangkut pucuk suku, maka harus melewati tahap datuk adat terlebih dahulu.

Berikut adalah nama pucuk suku dan *sukong* di Kecamatan Rambah Hilir.

<sup>140</sup> Hamdan, Mantan datuk adat suku *Maih Monilieng* yang selama belasan tahun telah menjabat sebagai datuk adat di Desa Muara Musu. Lamanya waktu menjabat menjadikan bapak Hamdan mempunyai banyak pengalaman dan wawasan luas khususnya tentang adat melayu Desa Muara Musu. Untuk itu penulis merasa perlu mewawancarai beliau sebagai penambah rujukan dan sumber informasi dalam penyusunan tesis ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABEL 2.2**  
**PUCUK SUKU MELAYU**  
**KECAMATAN RAMBAH HILIR**

No.	Nama Pucuk Suku	Nama Sukong	Nama Suku (Suku Nun 7)	Suku
1.	H. Hasan	Akil	Suku Melayu	<b>M E L A Y U</b>
2.	H. Yusuf	Dani	Suku <i>Maih Monilieng</i>	
3.	H. Anuar Tanso	Isol	Suku <i>Ampu</i>	
4.	Emzen	Manur Tuah	Suku <i>Kandang Kopuh</i>	
5.	Suder	Aler	Suku <i>Pungkuik</i>	
6.	Sias	Ahem	Suku <i>Kuti</i>	
7.	Agus	Ujang	Suku <i>Bonuo</i>	

Sumber : Hasil wawancara dengan datuk adat Sujang Neka

Jabatan pucuk suku merupakan jabatan yang lebih tinggi dari datuk adat.

Jadi setiap ada masalah di masyarakat, tidak bisa langsung dibawa ke pucuk suku. Karena dalam adat mempunyai tahapan tersendiri, pucuk suku bertindak jika masalah tidak berhasil ditangani oleh datuk adat. Untuk itu datuk adat yang paling berperan dalam urusan anak kemenakan.

## 2. Hukum Adat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adat recht*, yang menunjukkan sebagai sistem hukum asli sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru nusantara.<sup>141</sup>



Gambaran di atas menunjukkan proses lahirnya hukum adat, yaitu dimulai manusia melalui pikiran, keinginan, dan perilaku yang berubah menjadi sebuah kebiasaan, kemudian berkembang menjadi adat dan setelah itu menjadi hukum adat.

<sup>141</sup> Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hukum adat adalah keseluruhan adat yang tidak tertulis yang menjadi aturan hukum di masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.<sup>142</sup> Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Oleh karena masyarakat erat sekali hubungannya dengan antropologi, maka masyarakat diartikan kesatuan hidup dari manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.<sup>143</sup>

Adat diturunkan oleh nenek moyang. Keberadaan nenek moyang ribuan tahun lalu dari Hindia Belanda ini disusul pula oleh bangsa-bangsa Arab, Persia, dan Gujarat (India) serta bangsa Siam (Muang thai), Philipina dan lainnya. Bangsa pendatang baru ini peradabannya lebih kuat dan lebih tinggi dari suku tempatan, maka tidak mengeherankan mereka terdesak dan mengundurkan diri ke pedalaman. Mereka inilah yang disebut suku Melayu Tua dan kemudian dipopulerisasi dengan suku terasing.

Suku melayu tua disebut juga dengan penduduk asli dan mereka telah membawa agama serta kebudayaan dari negeri melayu. Agama mereka adalah animisme artinya percaya roh-roh (arwah), baik artinya dari roh manusia, benda, dan hewan-hewan yang dipandang aneh ajaib dan luar biasa. Adapula agama mereka disebut dengan dinamisme yang artinya percaya dengan benda-benda berkekuatan ghaib. Dibidang kemanusiaan mereka menjadikan batu-batuan untuk menjadi alat perkakas seperti : pisau, kapak, tombak dan lainnya yang bakal membantu mereka dalam menempuh kehidupan di hutan rimba,

<sup>142</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 6

<sup>143</sup> Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), hlm. 90



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

waktu kewaktu hingga berabad-abad. Dibidang kesenian mereka menggunakan kulit binatang untuk dijadikan gendang.<sup>144</sup>

Perkembangan adat di Kecamatan Rambah Hilir telah mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya, maka kelengkapan setiap induk dalam suku-suku yang ada dalam Kecamatan Rambah Hilir telah ditetapkan melalui musyawarah sebagai berikut :<sup>145</sup>

1. Setiap pucuk suku harus memiliki stempel yang berisi : nama suku, gelar, kecamatan luhak yang dipergunakan dalam surat menyurat, terutama surat keterangan kawin yang dikeluarkan oleh datuk adat.
2. Setiap pucuk suku harus membuat surat pengukuhan atau sejenisnya untuk setiap induknya yang sah.<sup>146</sup>,
3. Setiap pucuk suku harus membuat daftar nama serta gelar induk dalam sukunya masing-masing.
4. Setiap pucuk suku dan datuk adat harus memiliki pakaian seragam adat warna hitam model guntingan johor yang dipakai bila menyelenggarakan kenduri atau upacara-upacara adat.
5. Setiap induk harus membuat daftar nama anak buahnya kemudian menyerahkannya kepada pucuk suku masing-masing.
6. Tanda *borambin*<sup>147</sup>, untuk suku *andiko*<sup>148</sup> barang berupa perak.

<sup>144</sup> Abdul Aziz Noer Datuk Rangkayo Sutan Rambah, *Sejarah Peradaban Kerajaan Melayu Islam Luhak Rambah : Bahagian Pertama*, (PasarPengkaraian : Tanjung Belanti, 2001), hlm. 2

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>146</sup> Luhak adalah wilayah, suku, kelompok keturunan. Lihat : Azwar Aziz, *Kamus Bahasa Rokan Riau – Indonesia*, hlm. 92

<sup>147</sup> Tanda *borambin* adalah bungkusan-bungkusan yang dibawa oleh rombongan pengantin laki-laki menuju kediaman pengantin perempuan, biasanya dibungkus dengan kain hitam yang menandakan acara beradat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Nilai 1 *riya*<sup>149</sup> di kurs dengan nilai Rp. 3000
8. Kain *penyombahan*<sup>150</sup> 2 helai, kain sarung pelikat 1 helai untuk datuk perempuan disebut kain *penyombahan* dan 1 helai untuk datuk laki-laki disebut *peragih*.<sup>151</sup>
9. Letak *gantong cincin*.<sup>152</sup>
  - a. Emas di sebelah kanan pengantin
  - b. *Suaso*<sup>153</sup> di sebelah kiri pengantin
  - c. Perak di tengah kening pengantin
10. Pelaksanaan *berinai*<sup>154</sup> malam bagi pengantin dibolehkan dengan syarat pengantin perempuan ditempat perempuan, dan pengantin laki-laki di tempat laki-laki.
11. Hiburan keyboard atau semacamnya untuk acara adat istiadat seperti nikah kawin, cukur rambut dan lainnya tidak dibenarkan pada malam hari hanya boleh dilakukan siang hari.

<sup>148</sup> Suku *andiko* adalah suku *nun tujuh* (suku *Melayu*, suku *Maih Monilieng*, suku *Ampu*, suku *Kandang Kopuh*, suku *Pungkuik*, suku *Bonuo*, suku *Kuti*) ditambah suku nan Seratus, suku nan Lima Puluh.

<sup>149</sup> *Riya* adalah istilah sanksi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan kesalahan kepada datuk adat. Biasanya dinyatakan dalam jumlah angka sesuai dengan adat yang berlaku di desa Muara Musu.

<sup>150</sup> Kain *ponyombahan* adalah kain disiapkan tuan rumah untuk diberikan kepada datuk adat perempuan. Sedangkan *peragih* adalah istilah dari sifat kedermawanan tuan rumah kepada datuk adat.

<sup>151</sup> Ruslan, Datuk Adat Suku Melayu, *Wawancara*, Dusun Pasir Pinang Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 02 September 2019

<sup>152</sup> *Gantong cincin* adalah tradisi menggantung cincin di kening pengantin. Yaitu dengan mengikat tali dikening kemudian dililitkan ke bagian belakang kepala. Kemudian dikening akan digantungkan lagi 3 tali yang masing-masingnya tempat cincin menjuntai kebawah.

<sup>153</sup> *Suaso* adalah cincin yang terbuat dari besi.

<sup>154</sup> *Berinai* adalah tradisi menghias jari jemari dengan menggunakan inai. Pelaksanaan *berinai* dilakukan pada malam hari.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Bagi datuk yang tidak resmi atau belum dilantik tidak boleh melangsungkan acara adat kecuali seizin datuk yang resmi. Kalau dilaksanakan diutangkan menurut adat.
13. Bila terjadi perkara antara anak kemenakan<sup>155</sup> sebelum diajukan ke pihak berwajib, harus diselesaikan dikerapatan adat setempat, kalau belum mencapai kata sepakat atau penyelesaiannya baru dilanjutkan ke pihak hukum yang terkait.
14. Bagi yang melaksanakan nikah gantung<sup>156</sup> sebelum peresmian, pengantin laki-laki tidak dibenarkan tinggal serumah dengan pengantin perempuan menjelang peresmian. Jika acara peresmian sudah selesai, barulah laki-laki dibolehkan untuk tinggal serumah.

### 3. Sistem Kekerabatan Adat

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Dalam masyarakat persekutuan hukum adat Indonesia, pada prinsipnya terdiri dari tiga bentuk garis keturunan, yaitu sebagai berikut :<sup>157</sup>

1. Garis keturunan kebapaan (*Patrilineal*)

Merupakan orang-orang yang berhubungan darah menurut keturunan garis laki-laki saja, sedangkan keturunan wanita dipandang hanya sepnajang

<sup>155</sup> Anak kemenakan dalam bahasa daerah yang dikenal dengan *anak komonakan* adalah sebutan yang digunakan datuk adat atau induk adat kepada kaum familinya, kerabat yang ada di dalam suku yang dipimpinnya. Seseorang yang mempunyai garis keturunan sebagai anak dan sekaligus sebagai kemenakan, karena terjadi perkawinan yang bersilang dalam kaum atau familinya.

<sup>156</sup> Nikah gantung adalah pernikahan yang akad nikah berjarak beberapa bulan dari resepsinya. Contoh, akad nikah bulan Januari, resepsi atau pestanya bulan Februari.

<sup>157</sup> Mhd. Kastulani, *Hukum Adat : Suatu Pengantar*, (Pekanbaru : Suska Press, 2013), hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai dirinya saja sebagai keturunan, sedangkan ia hanya akan melanjutkan keturunan dari suaminya.

#### 2. Garis keturunan keibuan (*Matrilinieal*)

Merupakan orang-orang yang berhubungan darah hanya menurut keturunan garis wanita saja, sedangkan keturunan laki-laki dipandang hanya sepanjang mengenai dirinya saja. Oleh karena setelah kawin ia akan melanjutkan keturunan dari istrinya.

#### 3. garis keturunan keibu-kebapaan (*Parental*)

merupakan orang-orang yang berhubungan darah sebagai pelanjut keturunan dan garis ibu bapaknya dengan nilai yang sama derajatnya dalam arti sosial yang baik melalui garis keturunan laki-laki maupun melalui garis keturunan wanita.

Sedangkan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir, merupakan lokasi penelitian yang menganut sistem matrilinear yaitu menganut sistem keturunan dari ibu. Dimana anak-anak dan keturunan dominan mengikut garis keturunan ibu.

#### 4. Kewenangan Datuk Adat

Jenis pekerjaan datuk adat sangat banyak menurut adat istiadatnya. Di dalam pekerjaan sehari-hari terdapat pekerjaan yang sangat erat hubungannya dengan adat istiadat salah satunya tugas datuk adat dan kewenangannya di Desa Muara Musu adalah sebagai berikut :<sup>158</sup>

<sup>158</sup> Ruslan, Datuk Adat Suku Melayu, *Wawancara*, Dusun Pasir Pinang Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 02 September 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Concang tindiek*,<sup>159</sup> *baok kayie*,<sup>160</sup> memberi nama dan mencukur rambut.

Dalam acara memberi nama dan mencukur rambut, maka datuk adat dari kedua orang tua anak tersebut wajib hadir dengan memakai seragam hitam lengkap dengan songketnya. Seperti jika ayahnya suku *Ampu*, dan ibunya suku *Maih Monilieng* maka kedua datuk adat dari suku *Ampu* dan *mais* duduk dalam balairung yang telah disediakan. karna acaranya menggunakan adat, jadi jika datuk adat ditinggalkan maka tidak ada yang duduk sebagai datuk adat dan acara tidak bisa dilanjutkan karna telah menyalahi adat setempat.<sup>161</sup>

2. *Khotam kaji*<sup>162</sup>, akikah serta qurban

*Khotam kaji* dilakukan apabila seseorang telah menamatkan membaca al-Quran, biasanya dilakukan pengantin pada malam hari sebelum adat berinai dilakukan. Acara *khatam kaji* juga didukung oleh kegiatan barzanji dan berlimau. Begitu juga akikah dan qurban, tuan rumah harus menyiapkan sisir, cermin, serta bedak yang terbuat dari tepung basah yang sudah diwarnai untuk kemudian dioleskan sebelum hewan akikah

<sup>159</sup> *Concang tindiek* adalah kegiatan pemasangan anting bagi bayi perempuan. Menurut bapak Ruslan datuk adat suku Melayu mengatakan bahwa perlu melapor dan melibatkan datuk adat karena pemasangan anting akan mengeluarkan darah. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka datuk adat menjadi tempat mengadu dan datuk adat juga akan terlibat dalam mengurus jika sesuatu hal buruk menimpa bayi.

<sup>160</sup> *Baok kayie* adalah salah satu prosesi adat untuk khitan atau sunat. Baik itu khitanan anak laki-laki maupun anak perempuan. Keduanya harus melaporkan kepada datuk adat. *Baok kayie* ini merupakan kegiatan memandikan anak sebelum mereka di sunat.

<sup>161</sup> Sujang Neka, Datuk Adat Suku Bonuo, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 01 September 2019

<sup>162</sup> *Khatam kaji* adalah salah satu tradisi pembacaan ayat al Qur'an dimulai surat Adh-Dhuha yang dibaca pengantin dengan irama yang khas. Kemudian ayat pendek lainnya akan dibacakan oleh peserta *khatam kaji* yang lain. *Khatam kaji* dilakukan pengantin pada malam resepsi. *Khatam kaji* dilakukan sebelum acara berinai.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kurban dipotong. Tentunya menghadirkan datuk adat. Datuk adat harus hadir untuk memastikan semua kelengkapan adat sebelum hewan dipotong, kehadiran datuk adat diperlukan dari awal sampai acara akikahan atau kurban selesai.

#### 3. Nikah kawin

Setiap melaksanakan pernikahan maka yang mempunyai hajat baik itu pihak perempuan maupun pihak laki-laki akan memberikan uang lelah untuk datuk adatnya masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

#### 4. Perceraian

Jika terjadi salah cerai, maka datuk adat akan menerima sanksi yang harus dibayar oleh suami kepada datuk adat sebanyak 20 *riya*<sup>163</sup>.

#### 5. Timbun tanah

Jika seorang laki-laki yang meninggal, meninggalkan istri dua atau tiga orang maka yang paling baik tempat mayat suami adalah di rumah istri yang tua.<sup>164</sup> Pada waktu mayat laki-laki meninggal maka akan dimandikan datuk adat pihak laki-laki duduk di sebelah kepala sedangkan datuk adat perempuan di sebelah kaki, datuk adat laki-laki diberikan kain panjang satu helai dengan arti kata lepas tanggungjawabnya terhadap yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Bagi datuk adat yang perempuan menerima kain sarung satu helai berarti dia yang bertanggungjawab (dia yang *mengurung potang* dan *melepaskan pagi*) terhadap anak

<sup>163</sup> *Riya* adalah istilah sanksi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan kesalahan kepada datuk adat. Biasanya dinyatakan dalam jumlah angka sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Muara Musu.

<sup>164</sup> Buku Tata Cara Adat Meminang di Luhak Rambah, hlm. 23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keponakannya itu.<sup>165</sup> Selain dari pada itu warisnya yang menanggulangi. Mulai malam pertama hingga malam ketujuh, malam keempat puluh, malam ke seratus. Setelah itu timbun tanah serta memotong akikah jika belum dipotong. Kemudian bersama-sama meletakkan batu ke kuburan yang diawali oleh yang *bukopak leba burambai panjang*<sup>166</sup> seterusnya pucuk suku, datuk-datuk adat yang hadir ditutupi imam mesjid, setelah itu tahlil dan doa kemudian makan bersama.<sup>167</sup>

#### 6. Gelar menggelar adat

Acara gelar menggelar dilaksanakan mulai dari malamnya, yaitu merancang tatacara pelaksanaan acara gelar menggelar yang dihadiri oleh pucuk suku dan datuk adat. Syarat menggelar memotong seekor kambing. Satu ekor kambing dapat menggelar 3 orang atau paling banyak 4 orang. Nasi upah-upah dan ayam yang disediakan oleh masing-masing suku.<sup>168</sup>

7. Jual beli hak milik harta yang dibawa, harta yang ditepati dan harta bersama-sama jika hendak dijual haruslah melalui datuk adat kedua belah pihak (suami istri) dan disetujui oleh pucuk suku masing-masing.

8. Sunat Rasul termasuk salah satu diantara syariat Islam, karena adat Melayu Rambah Hilir telah membuat dasar istiadatnya “Adat berdasarkan syara’, syara’ berdasarkan Kitabullah. Jadi hukum adat harus

<sup>165</sup> Ruslan, Datuk Adat Suku Melayu, *Wawancara*, Dusun Pasir Pinang Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 02 September 2019

<sup>166</sup> Istilah atau sebutan untuk pemerintah dalam bahasa adat.

<sup>167</sup> Kaharudin, Datuk Adat Suku Ampu, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 07 September 2019

<sup>168</sup> Sudirman, Datuk Adat Suku Kuti, *Wawancara*, Dusun Gelugur Indah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 04 September 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan hukum agama Islam, jika bertentangan hukum adat dengan hukum agama Islam maka hukum itu bukan hukum adat. Satu di antaranya hukum agama itu ialah yang kita kenal dengan sunat Rasul atau berkhitan. Berkhitan yang dilakukan dengan cara adat tata caranya sebagai berikut :<sup>169</sup>

- a. Jika anak itu laki-laki umurnya 6-15 tahun
- b. Untuk pelaksanaannya orang tuanya harus memberi tahu datuk adat anak tersebut.
- c. Pelaksanaanya dapat dilakukan dengan berbagai cara, boleh dilaksanakan sendiri oleh orangtuanya dirumah dan boleh ditumpangkan pada acara keluarga.
- d. Urutan cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
  - 1) Mengundang
  - 2) Menghias
  - 3) Jika anak laki-laki mengkhataamkan kajinya
  - 4) Dimandikan bersama-sama kesungai
  - 5) Dibawa kerumah untuk dikhitan oleh mudin atau dokter
  - 6) Diupah-upah dengan nasi kunyit panggang ayam sebagai tanda telah *tokojuk togamang*<sup>170</sup> dan telah mengeluarkan darah.<sup>171</sup>

<sup>169</sup> Buku Hasil Keputusan Musyawarah Besar ke VII Kecamatan Rambah Hilir. Merupakan buku pegangan datuk adat sesuai dengan hasil musyawarah besar. buku ini hanya dimiliki oleh perangkat adat se Kecamatan Rambah Hilir, baik itu pucuk suku dan datuk-datuk adat yang ada di daerah kewenangan Kecamatan Rambah Hilir. hlm. 62

<sup>170</sup> *Tokojuk togamang* adalah trauma atas suatu kejadian, contohnya selamat dari kecelakaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk pelaksanaan sunat Rasul anak perempuan pelaksanaannya sama cuma umur anak 2 tahun dan tidak khatam kaji.

9. Jika perselisihan antara seseorang dengan orang lain tetapi mereka sesuku maka bila diselesaikan oleh datuk adat sudah barang tentu ada pihak yang salah dan pihak yang benar. yang salah mengakui kesalahannya dan yang benar memaafkan kesalahan yang salah (salah malah). Datuk adatlah yang menyalahkan dan memberi salah pada pihak yang salah dengan ketentuan dan batas-batas yang sudah diatur.<sup>172</sup>
10. Datuk adat juga berperan dalam menyelesaikan perselisihan seperti perkelahian, pemukulan, pertengkaran dan lain-lain. Jika perkelahian, pemukulan mengakibatkan bengkok, lebam, hutangnya sehidangan nasi kunyit makan sirih setepak. Tapi jika mengeluarkan darah atau luka maka denda nasi kunyit sehidangan ditambah lagi kain putih *sekabong* (4 hasta) dan biaya pengobatan istimewa lagi bila yang luka tersebut dileher ke atas maka dapat ditambah hutang dengan uang 10 *riya*.<sup>173</sup>

Kesemua jenis pekerjaan ini harusnya diketahui dan disetujui oleh datuk adat yang bersangkutan. Adapun seorang laki-laki atau anak bujang yang telah jatuh hati dengan seorang gadis sampai masa bergerak hati nuraninya untuk berumah tangga. Maka dalam keadaan ini di luhak Rambah, laki-laki itu harus

<sup>171</sup> Ridwan Melay, *Bungo Rampai Mongonang Kampong*, (Pemrakarsa Himpunan Keluarga Rokan Hulu Pekanbaru bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Dumai, 2016), hlm. 121

<sup>172</sup> Sudirman, Datuk Adat Suku Kuti, *Wawancara*, Dusun Gelugur Indah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 04 September 2019

<sup>173</sup> Rahim, Datuk Adat Suku Kandang Kopuh, *Wawancara*, Dusun Sosial 70 Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 05 September 2019. 1 *riya* : Rp. 3000,-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan kepada kedua orang tuanya. Setelah dapat berita maka kedua belah pihak memberi kabar kepada datuk adat masing-masing, bahwa anak laki-lakinya ingin meminang anak perempuan anak kemenakan salah satu suku *non tujuh*<sup>174</sup>. Setelah memberi kabar kepada datuk adat, maka kedua orang tua (ayah dan ibu) laki-laki membawa sehelai kain sarung kerumah orang tua perempuan yang akan dipinang. Jika kain itu diterima jelas sudah pinangan keluarga laki-laki diterima, tentu langkah berikutnya adalah jalan adat beradat. Ini sudah mulai masuk pada pekerjaan adat karna telah mempunyai tanda cakup yaitu sehelai kain, ini bukan tanda pertunangan.<sup>175</sup>

Masing-masing pihak mengabarkan kepada datuk adat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Datuk adat pihak laki-laki harus menyiapkan *bungkuih* (bungkusan) sesuai perhelatan yang akan diselenggarakan pihak perempuan. Adapun pertama adalah *bungkuih godang* atau bungkusan besar (karena pihak perempuan memotong kerbau atau sapi) *tepak tandonya* (tepak sirih) berupa : tepak yang terbuat dari kayu dengan ukiran berisikan sama seperti tepak layang hanya ada tambahan satu lagi yaitu isi cincin mas namun ada juga yang membuat cincin perak kecuali golongan bangsawan. Ini nantinya adalah perlambang adat dan akan dibawa pulang setelah ditebus oleh pihak laki-laki. Kedua *bungkuih monongah* (bungkusan menengah), yang harus disiapkan datuk adat laki-laki berupa : tepak yang sama dengan *bungkuih godang* (bungkusan besar) dengan *suaso* (cincin terbuat dari besi). Ketiga *bungkuih*

<sup>174</sup> Suku Nun Tujuh adalah suku *Melayu*, suku *Maih Monilieng*, suku *Ampu*, suku *Kandang Kopuh*, suku *Pungkuik*, suku *Kuti*, dan suku *Bonuo*.

<sup>175</sup> Buku Tata Cara Adat Meminang di Luhak Rambah, hlm. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sonik* (bungkusan kecil), yang harus disiapkan oleh datuk adat pihak laki-laki sama dengan *bungkuih monongah* (bungkusan menengah).

Berikut adalah perlengkapan yang diatur oleh datuk adat dalam pelaksanaan pernikahan. Menurut perlengkapan serta hikmahnya :

- a. Pinang 100 buah, buah pinang yang masih muda dibuat membentuk rantai. Hikmahnya adalah melambangkan sebuah keluarga yang dahulunya tidak ada hubungan apa-apa sehingga menjadi sebuah keluarga yang besar dan erat seperti diibaratkan sebuah rantai.
- b. Tepak sirih sebuah tepak yang diisi dengan sirih, kapur, gambir, tembakau dan pinang. Hikmahnya adalah melambangkan bahwa perkawinan itu menggunakan adat Melayu.<sup>176</sup>
- c. Sirih yang disusun dalam tepak, sirih yang digunting sehingga membentuk rantai yang sangat panjang. Hikmahnya adalah melambangkan bahwa kedua belah pihak pengantin sudah ada hubungan serta melambangkan hidup rukun dan damai dalam berkeluarga seperti susun sirih tersebut.
- d. Kapur, hikmahnya melambangkan kesucian yang dijadikan sebagai kebersihan di dunia sampai di akhirat.
- e. Gambir, hikmahnya melambangkan sama tahan susah dan senang biar hancur seperti tanah liat namun menegakkan kebersamaan.
- f. Pinang bulat, hikmahnya melambangkan sesuatu akan dikerjakan dengan musyawarah dengan mufakat yang bulat.

<sup>176</sup> Sujang Neka, Datuk Adat Suku Bonuo, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 01 September 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Tembakau, hikmahnya melambangkan siap di dalam pekerjaan hidup menanam dan memperkembangbiakkan tumbuh-tumbuhan yang dapat dipusakai oleh anak cucu.
- h. Kayu api yang terjalin dari bingkai, kayu yang diukir sedemikian rupa sehingga membentuk menara. Hikmahnya adalah melambangkan bekal pengantin laki-laki ke kediaman perempuan dan bekal mereka dalam berumah tangga. Dulunya kayu api ini merupakan kayu api yang digunakan untuk memasak, namun sekarang diganti dengan sebatang kayu yang diukir yang bermenarakan kubah masjid. Pada batang kayu tersebut diukir seperti susunan kayu api serta menaranya melambangkan keluarga yang taat beragama.
- i. Pelita, hikmahnya melambangkan jelas dan terang dapat dilihat dengan secara nyata atas hidup rukun damai keluarga suami istri.<sup>177</sup>
- j. Kelapa, yang diukir kemudian dihiasi dengan bendera kertas. Hikmahnya adalah melambangkan hiasan dalam rombongan pengantin. Hiasan ini bukan sembarang hiasan karena terdapat simbol bahwa kelapa muda ini kulitnya dapat diukir, air kelapanya disukai semua orang dan berkhasiat serta santannya dapat menghasilkan minyak kelapa. Hal ini bertujuan juga supaya pengantin laki-laki dapat bermanfaat dalam keluarga pengantin perempuan dan dapat membimbing dalam rumah tangga kedepannya.
- k. Alat masak, hikmahnya berkumpul segala anak cucu dan kemenakan demi kehidupan bersama.

<sup>177</sup> Buku Tata Cara Adat Meminang di Luhak Rambah, hlm. 7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abu, hikmahnya melambangkan senang dan susah tetap mendasar bagi rumah tangga menjalin kesatuan yang tidak bisa dielakkan.
- Minyak harum, hikmahnya melambangkan ingin berkembangbiak menumbuhkan kesejahteraan bahagia.
- Kaca, hikmahnya melambangkan sedia memeriksa diri di dalam segala hal berkeluarga.
- Sisir, hikmahnya melambangkan sedia menyelesaikan sesuatu yang kusut atau sengketa di dalam karib atau kerabat.
- Kain 44, hikmahnya melambangkan sedia mengembangkan membuat pusaka untuk anak dan cucu.
- Telur ayam, hikmahnya melambangkan dan mencerminkan bibit yang dibawa menjadi keturunan yang sholeh dan sholeha.<sup>178</sup>
- Bunga rampai, hikmahnya melambangkan sebagai ada yang tersimpan keharuman kesejahteraan antara kedua belah pihak.
- Gunting, hikmahnya melambangkan suatu keputusan yang telah diputuskan bersama.
- Pisau, hikmahnya melambangkan siap menambahi hutan atau mencangkul dan sebagainya.
- Bunga membebaskan hidup mereka daripada kesusahan.

Adapun nilai filosofis dari adat ke air berlimau ini adalah :

- Pemberian 4 macam bedak warna yaitu warna kuning, hitam, putih dan merah. Warna kuning diperuntukkan bagi pemerintah dan suku bangsawan,

<sup>178</sup> Buku Tata Cara Adat Meminang di Luhak Rambah, hlm. 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hitam golongan datuk adat, putih golongan alim ulama dan merah hulu balang negeri (pemuda).

2. Pemberian bedak di kening dan telapak tangan. Sejatinya bedak akan diletakkan dimuka namun diganti dengan pemberian bedak hanya dikening saja sebagai isyarat pengantinya sudah dibedak.<sup>179</sup>

Datuk adat dapat menyalahkan si suami dengan 8 *riya* apabila terjadi *salah corai* dengan cara sebagai berikut :<sup>180</sup>

- a. Tidak dihadapan datuk adat si istri, atau dengan kata lain sesuka hatinya.
- b. Menceraikan istrinya dengan talak tiga.
- c. Bila terjadi perselisihan dalam rumah tangga kemudian dia mengadukan kepada datuk adat si istri, tapi belum sempat diselesaikan oleh datuk adat dia lebih dahulu menceraikan istrinya tersebut.

#### 5. Gugurnya Jabatan Datuk Adat

Adapun yang menggugurkan jabatan sebagai datuk adat adalah sebagai berikut :<sup>181</sup>

- a. Hilang tak tahu rimbanya.
- b. Pindah ketempat yang lain dengan tidak terjangkau. Berarti akan menyebabkan kesulitan untuk anak kemenakan menemui datuk adatnya.

Ini bisa menggugurkan jabatan sebagai datuk adat.

<sup>179</sup> Sujang Neka, Datuk Adat Suku Bonuo, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 01 September 2019

<sup>180</sup> Buku Hasil Keputusan Musyawarah Besar ke VII Kecamatan Rambah Hilir. Merupakan buku pegangan datuk adat sesuai dengan hasil musyawarah besar. buku ini hanya dimiliki oleh perangkat adat se Kecamatan Rambah Hilir, baik itu pucuk suku dan datuk-datuk adat yang ada di daerah kewenangan Kecamatan Rambah Hilir. hlm. 83

<sup>181</sup> Hasil Rapat Adat Tentang *Pantang Larang Menurut Perpatih Nan Sobatang*, telah diketik oleh tokoh adat Lembaga Adat Melayu Rokan Hulu yaitu Almarhum Datuk Siboh dengan tujuan pelestarian Adat Melayu. Buku-buku adat milik almarhum penulis temukan dikediamannya di Aur Betung.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Terpijak benang arang*, maksudnya berzina, berjudi, minum-minuman keras, mencuri dan lain-lain.
- d. *Temandi pancuran gading*, maksudnya berbuat dzolim kepada masyarakat atau kepada anak kemenakan. Seperti menjadikan anak kemenakan sebagai tempat mencari uang atau memperkaya diri sendiri.
- e. *Terpijak digalah panjang* dengan arti sakit yang menular tidak dapat diobati. Di prediksi masyarakat tidak akan sembuh, maka diganti dengan datuk adat yang baru. Tetapi tidak dilantik, karena datuk adat yang baru hanya bersifat penolong saja, menjelang bisa sembuh dan tidak bisa langsung diberhentikan.
- f. *Terkurung dibilik dalam*, maksudnya terkurung dalam penjara atau menjadi tersangka.
- g. Mati atau meninggal.

Jadi, hal di atas merupakan hal yang dapat menggugurkan jabatan seorang datuk adat. Adapun yang tidak bisa diurus adat (bukan kewenangan datuk adat) adalah sebagai berikut :<sup>182</sup>

- a. Teroris
- b. Narkoba
- c. Illegal logging
- d. Migas dan non migas
- e. Geng motor

---

<sup>182</sup> Hasil Rapat Adat Tentang *Pantang Larang Menurut Perpatih Nan Sobatang*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### D. PERCERAIAN

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>183</sup> Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama karena tidak ada ikatan yang resmi. Ada dua jenis perceraian yaitu cerai hidup dan cerai mati, berikut adalah penjelasannya :<sup>184</sup>

#### 1. Cerai hidup

Cerai hidup merupakan perpisahan antara suami dan isteri atau berakhirnya hubungan yang disebabkan adanya ketidakbahagiaan antara kedua belah pihak dan perceraian ini diakui secara legal atau hukum.

#### 2. Cerai mati

Cerai mati merupakan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah satu pasangan baik suami maupun istri, yang mana pihak yang ditinggalkan harus menjalani kehidupannya sendiri.

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 pasal 39-41 yang menjelaskan ada dua jenis perceraian :<sup>185</sup>

#### 1. Cerai gugat

Cerai gugat merupakan berpisahnya hubungan antara suami dan istri dimana pihak istri yang lebih dulu mengajukan gugatan cerai kepada suami.

#### 2. Cerai talak

<sup>183</sup> A. Saebani Beni, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 47

<sup>184</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 184

<sup>185</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, (Bandung : Citra Umbara, 2007), hlm. 16



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cerai talak merupakan berpisahnya hubungan suami dan istri dimana pihak suami yang memberikan talak kepada istri.

Faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya perceraian di antara suami dan istri :<sup>186</sup>

#### 1. Ketidakharmonisan dalam berumah tangga

Ini merupakan alasan yang sering didengar ketika pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah. Ketidakharmonisan ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan, akhlak, pandangan, keyakinan, dan lain-lain.

#### 2. Krisis moral dan akhlak

Perceraian juga dapat disebabkan oleh krisis moral dan akhlak contohnya seperti kelalaian tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan dan keburukan perilaku lainnya.

#### 3. Perzinahan

Perzinahan yang menyebabkan perceraian adalah hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh suami maupun istri.

#### 4. Kurang komunikasi

Tidak ada hubungan harmonis tanpa komunikasi yang baik. Misalnya karena secara intelektual tak seimbang, pribadi terbuka yang berhadapan dengan pribadi yang tertutup, dan lain-lain.

#### 5. Ekonomi

Uang memang masalah sensitif tapi tidak membicarakannya hanya memperburuk keadaan. Jika suami tidak memberi nafkah atau istri hidup tidak seimbang dengan penghasilan sering juga memicu perceraian. Akibatnya, kedua merasa tidak nyaman dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban.

<sup>186</sup> Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>183</sup>

Menurut Sutrisno Hadi dalam bukunya bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>184</sup> Setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai pada objek yang dikaji agar kegiatan penelitian ditulis dengan sistematis dan terarah. Dalam penulisan tesis ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena objeknya dilakukan di lapangan yakni di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ini meneliti tentang perilaku sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa dinyatakan dalam perhitungan angka-angka, dengan alasan lebih mudah jika berhadapan

<sup>183</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 6

<sup>184</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 46

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kenyataan ganda, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, serta lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penerjemahan pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.<sup>185</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Kualitatif yaitu suatu jenis data yang dikategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan empiris, yaitu :

- a. Pendekatan sosiologis ialah memahami keadaan dan kondisi yang ada di dalam masyarakat terutama di wilayah penelitian.<sup>186</sup> Penelitian ini dilakukan untuk memahami keadaan masyarakat Desa Muara Musu terutama tradisi yang berlaku dalam penyelesaian sengketa suami istri yang ditengahi oleh datuk adat setempat serta dampaknya terhadap perceraian.
- b. Pendekatan empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sebab penelitian hukum

<sup>185</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 5

<sup>186</sup> Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Grafika, 1990), hlm. 16

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang diambil ialah fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami peran hakam dalam pernikahan yang dilakukan oleh datuk adat di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kaabupaten Rokan Hulu kemudian dihubungkan dengan hukum Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian (humanistik).<sup>187</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah datuk adat di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian. Sebagai objek penelitian ini adalah peran datuk adat sebagai hakam dalam pencegahan perceraian suami istri di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

### 4. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi terget kesimpulan dari hasil akhir satu penelitian atau keseluruhan obyek penelitian.<sup>188</sup>

<sup>187</sup> Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 33

<sup>188</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Kuantitatif dan Kualitatif), (Jakarta : Gaung Persada Press, 2009), hlm. 68



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>189</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah datuk adat di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Datuk adat terdiri dari 7 datuk adat.<sup>190</sup>

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data.<sup>191</sup> Sampel adalah bagian dari jumlah dan Karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>192</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses culturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
- 2) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada yang diteliti.
- 3) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.

<sup>189</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19, hlm. 80-81.

<sup>190</sup> Sujang Neka, Datuk Adat Suku Ampu, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, 17 April 2019

<sup>191</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 54

<sup>192</sup> Sugiyono, *Metode*, hlm. 81

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
- 5) Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.<sup>193</sup>

Untuk penentuan sampel, yang digunakan adalah total sampling (teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi).<sup>194</sup> Alasan total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 7 orang.

### 5. Sumber Data

Adapun sumber data<sup>195</sup> yang mendukung tulisan ini terdiri dari:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Karena ini penelitian lapangan, maka sumber primernya berupa data yang diperoleh dari datuk adat di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
2. Sumber data sekunder yaitu mencakup buku-buku yang sifatnya sebagai data pendukung.<sup>196</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang

<sup>193</sup> *Ibid.*, hlm. 53-54

<sup>194</sup> Hadi Sabri Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 303

<sup>195</sup> Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu menurut bentuk dan isi. Menurut bentuknya jenis sumber data terbagi dua yaitu sumber tertulis (printed materials) atau dokumen, dan sumber bukan tertulis (non printed material). Sedangkan sumber data menurut isi, yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier.

<sup>196</sup> Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta : ANDI, 2010), hlm. 190

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan, dari buku-buku, jurnal dan yang lain sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.

3. Sumber data tersier yaitu sumber data pelengkap yang terdiri dari Al-Qur'an, Kitab-kitab Hadits, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, serta Undang-undang Perdata.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi : yaitu suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>197</sup> Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.<sup>198</sup> Penulis menyaksikan langsung peran datuk adat dalam menyelesaikan sengketa suami istri di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penulis melihat dengan panca indra mata jalannya proses penyelesaian sengketa suami istri oleh datuk adat. Penulis juga mendengar semua pembicaraan selama proses penyelesaian. Baik itu perdebatan suami istri

<sup>197</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Suatu pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 220

<sup>198</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*, (Yogyakarta : Uin Maliki Press, 2010), hlm. 142.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kembali muncul saat perundingan, maupun nasehat-nasehat yang diberikan datuk adat.

Perundingan berjalan pada malam hari, untuk penentuan tempat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Ada yang penyelesaiannya di rumah datuk adat, ada juga di rumah pihak yang bersengketa (suami istri). Penyelesaian sengketa rumah tangga biasanya di adakan setelah sholat Isya. Perundingan di hadiri oleh suami istri, kedua datuk adat, tokoh masyarakat, alim ulama, serta aparat desa. Semuanya duduk saling berhadapan, ada yang duduk membentuk lingkaran kadang juga duduk bersandar di dinding dalam rumah.

Tuan rumah juga menyuguhkan makanan dan minuman untuk datuk adat dan yang datang lainnya. Penyelesaian oleh datuk adat bersifat tertutup. Meski demikian, pintu rumah tetap terbuka selama proses penyelesaian. Datuk adat, alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir tidak langsung membuka persidangan. Tetapi ketika masuk rumah mereka bersikap seperti bertemu teman pada umumnya, merokok, dan juga tertawa, basa basi. Jika semua sudah hadir, barulah acara dimulai dan dibuka langsung oleh datuk adat.

2. Wawancara : yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>199</sup> Wawancara juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam

<sup>199</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Putra, 2006), hlm. 155



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban-jawaban responden.<sup>200</sup> Pertanyaan diajukan kepada datuk adat di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penulis mengunjungi langsung kediaman datuk adat untuk menanyakan seputar pembahasan yang menjadi topik penelitian. Mulai dari perannya secara umum, ketentuan-ketentuan di dalam adat, serta perannya secara khusus di bidang hukum keluarga terutama peran sebagai hakam dalam penyelesaian persengketaan suami istri di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan hulu.

3. Studi Kepustakaan : yaitu dengan menghimpun informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini. Semua buku tentang fiqih munakahat yang didapatkan penulis, buku yang membahas tentang pernikahan secara umum yang memuat bahasan tentang pembahasan ini, buku adat melayu baik itu bersifat melayu umum seperti buku adat melayu Asia Tenggara, buku adat melayu Indonesia, buku adat melayu Riau, buku adat melayu Kabupaten Rokan Hulu, buku adat melayu Kecamatan Ramabah Hilir, maupun melayu adat daerah yang lebih khusus di Desa Muara Musu.

#### 7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

<sup>200</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar peneliti untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan yang telah diketik dalam selembar kertas. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memuat tentang data dan informasi yang ingin didapatkan penulis dari datuk adat.

Pedoman wawancara ini diperlukan untuk mengatasi supaya penulis tidak lupa mengajukan pertanyaan saat sesi wawancara dan lebih menghemat waktu supaya semua informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan dalam satu kali sesi wawancara, hal ini menghemat waktu karena tidak ada informasi yang belum di dapatkan, semua pertanyaan telah diajukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun.

- b. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Dalam proses wawancara dan mencari informasi seputar pembahasan ini, maka penulis menggunakan buku catatan dan alat tulis yang kemudian digunakan mencatat hal-hal penting untuk di olah menjadi sebuah data dan informasi yang sistematis.

- c. HP (hand phone) berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan. Untuk mendapatkan informasi, penulis menggunakan HP untuk merekam semua jawaban yang diperoleh. Karena rekaman bisa diputar kembali saat penulis merasa ragu dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban yang telah di berikan informan. Dengan sistem rekaman ini, menurut penulis lebih efektif dan bisa fokus untuk memahami setiap informasi. Berbeda dengan sistem tulis, terkadang yang disampaikan datuk adat terlalu cepat sehingga penulis tidak fokus untuk menulis juga memahami informasi tersebut.

## 8. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan teknik analisa data, teknik-teknik yang digunakan penulis dalam penulisan adalah sebagai berikut :

### a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya di analisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.<sup>201</sup> Dalam penulisan ini, penulis memaparkan tentang adat pernikahan melayu beserta peran datuk adat secara umum, kemudian di persempit kepada peran datuk adat di bidang hukum keluarga tentang hakam.

### b. Induktif

Dengan metode ini, penulis juga memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.<sup>202</sup> Dalam metode ini, penulis memaparkan peran datuk adat tentang hakam secara khusus untuk di analisis secara meluas menurut hukum Islam. Serta pengaruh peran tersebut terhadap perceraian dalam masyarakat.

<sup>201</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 26

<sup>202</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemusatan perhatian dengan penyederhanaan, pengabrakan, dan transformasi data kasar yang terlihat dari catatan tertulis di lapangan. Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilah-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian.

2) Displat Data

Displat data adalah analisis data yang dilakukan dengan cara berbagai tabel dan keseluruhan data yang diperoleh sehingga lebih mudah untuk melakukan analisis.

3) Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti.

4) Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai peneliti mendapatkan data



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diinginkan. Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.<sup>203</sup>

3. Deskriptif Analitik

Mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini. Dalam metode ini, ketika data di dapatkan, maka penulis akan memberikan keterangan untuk menjelaskan data tersebut. Kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur.

<sup>203</sup> Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian Peran Datuk Adat sebagai Hakam dalam Pencegahan Perceraian suami istri di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

1. Peran datuk adat sebagai hakam yaitu dengan cara sesama datuk adat dari kedua belah pihak terlebih dahulu menyatukan kerja yang disertai dengan makan pinang dan setepak sirih. Baru di sampaikan kepada datuk adat yang keberatan kepada datuk adat ahli rumah, *nak di atak nak di etong nak di bancih nak di bancah* anak kemenakan yang *kusuik nak diluruihkan, nak koruh nak dijoniehkkan kalau bisa kalau dapek*. Datuk pun menyerahkan kepada yang ditunjuk sebagai penanya bagi kedua belah pihak dan kepada orang yang hadir dalam rundingan. Jadi penanya inilah yang nantinya akan bertugas sebagai penanya ke masing-masing pihak secara bergantian supaya sidang sengketa berjalan dengan tertib dan tenang. Nasehat di berikan ketika masing-masing pihak telah menceritakan sebab musabab terjadinya pertengkaran. Kalau tidak selesai oleh datuk adat, barulah dilanjutkan kepada pucuk suku dengan surat yang sudah ditandatangani berisi pernyataan bahwa proses penyelesaian sengketa suami istri telah diurus oleh datuk adat.
2. Datuk adat dinilai telah berhasil mengurangi angka perceraian di Desa Muara Musu kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Bahkan dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil wawancara penulis ke semua datuk adat, mereka menyatakan bahwa sangat jarang sekali terjadinya perceraian. Jika itu sampai terjadi, dalam waktu kurang dari sebulan pasti akan rujuk kembali. Karena dari itu, menurut hemat penulis peran datuk adat sebagai hakam untuk suami istri bersengketa dianggap telah berhasil mendamaikan dan menyelesaikan sengketa rumah tangga juga dinilai sebagai upaya yang paling efektif untuk keluarga-keluarga yang ada di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir.

3. Peran yang dilakukan datuk adat sebagai hakam dalam menyelesaikan sengketa suami istri, jika dilihat dari hukum Islam secara umum tidak ditemukan adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan kaidah dan tuntunan yang terdapat di dalam hukum Islam dan telah sesuai dengan tujuan atau nilai-nilai keIslaman karena tujuan utama datuk adat untuk mengadakan kebaikan bagi kedua suami istri sehingga pernikahan dapat di pertahankan dan terhindar dari perceraian. Hanya saja seharusnya datuk adat tidak menghindari ketika ada yang memintanya datang sebagai penengah. Hal ini yang menyebabkan datuk adat belum sampai ke tahap hakam yang di maksud dalam al-Qur'an. Karena mendamaikan sistem datuk adat tidak berlaku untuk seluruh pasangan suami istri.

#### B. SARAN

Adapun saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Kepada segenap sarjana Muslim, khususnya alumni Syariah dan hukum yang menggeluti pelajaran tentang hukum perkawinan, sangat diharapkan keterlibatan dalam memberikan sumbangsih pemikiran tentang hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga Islam kepada masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir yang selama ini hanya menjalankan adat secara turun temurun.

2. Kepada masyarakat Desa Muara Musu untuk memahami ketentuan Allah atau syari'at Islam itu lebih baik dari segalanya. Masalah penyelesaian sengketa suami istri yang dilakukan oleh datuk adat, ketahuilah bahwasannya Islam telah mengatur tentang hakam dengan syarat yang telah diatur oleh agama Islam. Ketetapan dan keputusan yang terdapat dalam adat atau tradisi dapat dilaksanakan selama adat dan tradisi yang ada tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Jika adat dan tradisi bertentangan dengan syari'at Islam, maka kita harus mendahulukan syari'at Islam dari pada adat istiadat tersebut.
3. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi para akademis intelektual dan orang-orang yang mendalami ilmu agama dalam masalah perkawinan adat Melayu khususnya para pejabat adat yang terlibat dalam Lembaga Adat Melayu (LAM) Rokan Hulu yang berlokasi di pusat kota Pasir Pengaraian, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah tidak ada kesalahan di dalam mengerjakannya.





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Cet. Ke-4, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqih Munakahat*, Alih Bahasa oleh Abdul Majid, Jakarta : AMZAH, 2009
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqih Munakahat*(*Khitbah, Nikah, dan Talak*), Jakarta : Amzah, 2009
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Juz I*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Abdul Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012
- Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr, 1981 M
- Abi al-Qasim al-Husein bin Muhammad terkenal dengan nama al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, tt, Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, tth
- Abu al-Ainin Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al-Hisbah fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir : Dar al-Fikr, 1976
- Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, *Shahih Bukhari bin Al-Hasiyah Imam Al-Sindi Jilid 3*, Beirut Lebanon : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971
- Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, Jakarta : Gema Insani, 2005
- Ahmad Abdul Karim Hasan, *Menggugat Fikih Maslahat*, Penerjemah : Tono Muskito, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2014
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-9, Yogyakarta : UII Press, 2000
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi (Jilid V)*, Terjemahan K.Anshor Umar, Semarang : Toha Putra, 1988
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi juz V*, Mesir : Mustafa al-Babi Al-Habibi, 1934



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gema Media, 2001
- Ahmad Ruslan, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, Pustaka : Bandung, 1985
- Ahmad Warson al-Munawir, *Al-Munawir : Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013
- Al-Mu'jam *al-Wajiz*, Mesir : Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1994
- Amat Ghazali (Imam masjid Dusun Sei. Mojai), *Wawancara*, Desa Muara Musu, tanggal 17 April 2019
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2006
- Ananda Santoso dan S Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Kartika, 1995
- Arifin, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Alih Bahasa oleh Muhammad Abidun dkk, Jakarta : Darul Fath, 2008
- Azwar Aziz, *Kamus Bahasa Rokan Riau – Indonesia*
- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Grafika, 1990
- Buku Hasil Keputusan Musyawarah Besar ke VII Kecamatan Rambah Hilir. Merupakan buku pegangan datuk adat sesuai dengan hasil musyawarah besar. buku ini hanya dimiliki oleh perangkat adat se Kecamatan Rambah Hilir, baik itu pucuk suku dan datuk-datuk adat yang ada di daerah kewenangan Kecamatan Rambah Hilir.
- Buku Tata Cara Adat Meminang di Luhak Rambah
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2008
- Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Mekar, 2004



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1999
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Dirjen Bimbaga Islam Depag RI, *Ilmu Fikih*, Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985
- Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Asy-Syifa, 1992
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Elha Santoso, *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Dua, 2009
- Eriyandi Budiman, *Upacara Adat Nusantara*, Cirebon : CV. Gunung Djati, 2008
- Ermanita Erlis, Kasi Pelayanan Kantor Desa Muara Musu, *Wawancara*, 17 April 2019
- Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta : ANDI, 2010
- Fatimah Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, Bandung : Cendekiawan, 1999
- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka al-Husna, 1994
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amni, 2002
- Hadi Sabri Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hamka, *Tafsir Al- Izhar*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 2005
- Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993
- Hasan Ayyub, *Fiqh Usratil Muslimat*, Alih Bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, Fiqh Keluarga, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Herlambang, *Jurnal*, Membangun Asas-asas Peradilan Adat Studi pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut : Dar Al-Jill, 1989
- Imam Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*, Jakarta : Multi Kreasi Satudelapan, 2012
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, Beirut : Dr al-Kutub al-Ilmiah, 9494
- Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metode Penelitian Agama*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2001
- Irfan, *Jurnal* : Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama
- Irwan Effendi dkk, *Upah-upah Tradisi Membangkit Semangat dalam Masyarakat Melayu*, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2008
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Kuantitatif dan Kualitatif), Jakarta : Gaung Persada Press, 2009
- Ismail Hamkaz dan Zailendra, *LUHAK KEPENUHAN : dalam Bingkai Berita antara Konsep, Realita, dan Agenda untuk Indonesia*, Pasir Pengaraian : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, 2014
- Itam, Datuk Adat Suku Pungkuik, *Wawancara*, Dusun Muara Musu Timur Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 06 September 2019
- Jalaluddin al-Mahally, *Qalyby Wa Umairah*, Mesir : Daar al-Ihyaa' al-Kutub al-'arabiyah, tth
- Junaidi Syam Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, *Trombo Rokan*, Pasir Pengaraian, Yayasan Garasibumy, 2007
- Junaidi Syam, *Sejarah Kerajaan Lima Luhak di Hulu Sungai Rokan*, Pasir Pengaraian : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, 2012
- Junaidi Syam, *Teromba Tambusai*, Pasir Pengaraian : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kaharudin, Datuk Adat Suku Ampu, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 07 September 2019
- Kama Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Proyek Pembangunan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah Tahun 2005, *Adat Perkawinan Lima Luhak di Kabupaten Rokan Hulu*, Pasir Pengaraian, 2005
- Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, *Potensi Budaya Rokan Hulu*
- Kasus Hajar Aswad dimuat dalam kisah-kisah Nabi Muhammad, di antaranya dalam Muhammad Husein Hackal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Bogor : Litera Antar Nusa, 1995
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. I*, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), hlm. 384
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya : Al-Ikhlâs, 1993
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta : Pustaka Karini, 2007
- Mahidin Said, *Adat dan Kebudayaan Pasir Pengaraian Riau*, Pekanbaru, 1998
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab indonesia*, alih bahasa oleh Abdurrahman Al-Baghdadi, Jakarta :PT. Mahmud Yunus, 2010
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011
- Merliansyah, *Tesis : Pengangkatan Hakam (Juru Damai) dalam Perkara Perceraian sebagai Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*, Yogyakarta : Uin Maliki Press, 2010
- Mohammad Zaharudin Zakaria, *Modul Qawaidh Fiqhiyyah*, Malaysia: Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM), 2012
- Muhammad Ali Ash-Shobuniy, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Al-Qur'an*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamdy dan Imron Al-Manan, Surabaya : Bina Ilmu, 1985
- Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, *Kesalahan-kesalahan Suami*, Surabaya : Pustaka Progresif, 2004
- Muhammad Fahmi al-Syafi'i, *Kamus Al-Fazhil Qur'aniyah*, tt, Dar Al-Ma'arif , 1993
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Jakarta : Penerbit Lentera, 1996
- Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, Yogyakarta : Kata Hati, 2005
- Muhammad Saifullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*. Penelitian Individual, tidak diterbitkan, Semarang : IAIN Walisongo, 2002
- Muhammad Salam Mazkur, *Al-Qadla fi Al-Islam*, Cairo, ttp, 1994
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok : Rajawali Pers, 2018
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Suatu pendidikan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011
- Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta : Amzah, 2015
- Nasir, Datuk Adat Suku Mais, *Wawancara*, Dusun Gelugur Indah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 17 April 2019
- Ny. Soemiati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta, Liberty, 2007
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahim, Datuk Adat Suku Kandang Kopuh, *Wawancara*, Dusun Sosial 70 Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 05 September 2019
- Ridwan Melay, *Bungo Rampai Mongonang Kampong*, Pemrakarsa Himpunan Keluarga Rokan Hulu Pekanbaru bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Dumai, 2016
- Rokan Hulu Regency, Riau – Indonesia, Kabupaten Rokan Hulu Negeri Seribu Suluk
- Ruslan, Datuk Adat Suku Melayu, *Wawancara*, Dusun Pasir Pinang Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 02 September 2019
- Sa'dy Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhy Lughatan Wa Iistilahan*, Suriyah : Dar al-Fikr, 1949
- Said Agil Husein al-Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta : BMI, 1994
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Salih Bin Ghonim as-Sadlan, *Kesalahan-kesalahan Istri*, Jakarta : Pustaka Progresif, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib dengan judul “*Fikih Sunnah*” Juz VIII, Cet. Ke-V, Bandung : Al-Ma’rif, 1987
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Sudirman, Datuk Adat Suku Kutu, *Wawancara*, Dusun Gelugur Indah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Putra, 2006
- Sujang Neka, Datuk Adat Suku Bonuo, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007

Sukmadjaja Asy'ary dan Rosy Yusuf, *Indeks al-Qur'an*, Bandung : Pustaka, 2006

Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, Jakarta : Qitshi Press, 2003

Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001

Suwardi, *Mengembalikan Kejayaan Melayu di Indragiri : Langkah Mempercepat Kesejahteraan Rakyat dalam Bingkai Otonomi Daerah*, Pekanbaru : Alaf Riau, 2007

Syeikh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargaku ke Surga : Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Di Atas Titian Manhaj Rasulullah*, Jakarta : Mirqat Media Grafika, 2007

Tenas Effendy, *Pemimpin dalam Ungkapan Melayu*, Selangor : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002

Tengku Dedy Ardiansyah, *Bersatulah Melayu*, Bandung : Oxide Systems  
Indonesia, 2013

Tihami, Fikih Munakahat : *Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Press, 2009

Tim PenyusunNn Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, 2003

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

W.J.S Poerwadarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayie dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011

Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1978





## DAFTAR WAWANCARA DENGAN DATUK ADAT DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU

---

### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah bapak tahu bahwa di dalam hukum Islam penengah sengketa suami istri di sebut dengan istilah hakam?
2. Bagaimana cara bapak dalam menyelesaikan sengketa suami istri?
3. Apa landasan bapak dalam penyelesaian tersebut?
4. Apakah dalam setiap sengketa suami istri harus diselesaikan oleh datuk adat?
5. Apakah penyelesaian oleh datuk adat ini berlaku untuk seluruh suami istri yang bermasalah?
6. Apakah ada aturan-aturan yang harus di patuhi dalam proses penyelesaian sengketa suami istri seperti sanksi bayar dan lainnya?
7. Apakah datuk adat punya kewenangan menjatuhkan putusan untuk menyatukan dan menceraikan?
8. Apakah sengketa suami istri bisa diselesaikan dalam satu kali rundingan?
9. Apa masalah yang paling sering menjadi konflik dalam rumah tangga?
10. Apa kesulitan bapak dalam proses penyelesaian?
11. Kapan datuk adat di hadirkan dalam penyelesaian sengketa suami istri?
12. Apa saja kewenangan datuk adat selain urusan pernikahan?
13. Apa saja syarat menjadi datuk adat?



## DAFTAR WAWANCARA DENGAN DATUK ADAT DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU

1. Apakah bapak tahu bahwa di dalam hukum Islam penengah sengketa suami istri di sebut dengan istilah hakam?
2. Bagaimana cara bapak dalam menyelesaikan sengketa suami istri?
3. Apa landasan bapak dalam penyelesaian tersebut?
4. Apakah dalam setiap sengketa suami istri harus diselesaikan oleh datuk adat?
5. Apakah penyelesaian oleh datuk adat ini berlaku untuk seluruh suami istri yang bermasalah?
6. Apakah ada aturan-aturan yang harus di patuhi dalam proses penyelesaian sengketa suami istri seperti sanksi bayar dan lainnya?
7. Apakah datuk adat punya kewenangan menjatuhkan putusan untuk menyatukan dan menceraikan?
8. Apakah sengketa suami istri bisa diselesaikan dalam satu kali rundingan?
9. Apa masalah yang paling sering menjadi konflik dalam rumah tangga?
10. Apa kesulitan bapak dalam proses penyelesaian?
11. Kapan datuk adat di hadirkan dalam penyelesaian sengketa suami istri?
12. Apa saja kewenangan datuk adat selain urusan pernikahan?
13. Apa saja syarat menjadi datuk adat?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mengemukakan sumbernya

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Yulianti  
ID Number : 21790225832

Date of Birth : July 13, 1994

Sex : Female

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

### English Proficiency Test

Listening Comprehension : 68

Structure & Written Expressions : 68

Reading Comprehension : 58

Overall Score : 647

Expired Date : July 21, 2021



The Head of Language Development Center



English Proficiency Test Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004

HP: 0852 7144 0823 Fax: (0761) 838832

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

Mahyudin Syukri, M. Ag

NIP. 19720421 200604 1 003





STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Yulianti

Nomor ID : 21790225832

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir : 13 Juli 1994

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

56 : الاستماع

54 : القواعد

57 : القراءة

557 : النتيجة

Berlaku Hingga : 28 September 2021



Arabic Proficiency Test Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP: 0852 7144 0823

Email : info@pusatbahasa.info Website : pusat-bahasa.info



Mahyudin Syukri, M. Ag

The Head of Language Development Center



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Nomor : 2008/Un.04/PPs/PP.00.9/2019  
 Lamp. : 1 berkas  
 Perihal : Penunjukan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 20 Agustus 2019

Kepada Yth.

1. Prof. Dr. Sudirman. M. Johan, MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. H. Heimi Basri, Lc, MA (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n.:

Nama	: Yulianti
NIM	: 21790225832
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Semester	: III (tiga)
Judul Tesis	: Hakam Dalam Masyarakat Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam (Peran Datuk Adat Dalam Pernikahan Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian; dan
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,  
 Direktur,



Prof. Dr. Afrizal M, MA  
 NIP. 19591015 198903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dititik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1913/Un.04/PPs/PP.00.9/2019  
 1 berkas  
 Izin Melakukan Kegiatan Penelitian Tesis

Pekanbaru, 5 Agustus 2019

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
 Di  
 Pekanbaru

Dengan hormat,  
 Dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sau-dara untuk  
 mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Yulianti
NIM	: 21790225832
Program Pendidikan	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Semester	: III (Tiga)
Judul Tesis	: Hakam Dalam Masyarakat Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Peran Datuk Adat Dalam Pernikahan Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)

untuk melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang  
 diperlukannya dari Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam  
 Direktur,  
  
 Prof. Dr. Afrizal M. MA  
 NIP. 19591015 198903 1 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
KECAMATAN RAMBAH HILIR  
DESA MUARA MUSU

Alamat : Jln. Karet No. 1 Muara Musu

Kode Pos : 28557

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/SK-MM/XI/2019/274

Yang beranda tangan di bawah ini :

: **AMRI**

: Kepala Desa Muara Musu

Dengan ini menerangkan bahwa :

: **YULIANTI**

Nomor Induk Mahasiswa : 21790225832

: Hukum Keluarga

: S-2 (Strata 2)

Penar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data untuk bahan Tesis dengan judul :

**Hakam dalam Masyarakat Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Peran**

**Datuk Adat Dalam Pernikahan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten**

**Rokan Hulu)".**

Demikianlah surat keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Muara Musu

Pada tanggal : 22 November 2019

KEPALA DESA MUARA MUSU

  
**AMRI**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap melanggar Undang-undang Hak Cipta Diilindungi Undang-undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmptsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmptsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

### REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/244

Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari DPMPTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25142 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan Tesis, dengan ini dapat diberikan rekomendasi kepada :

: YULIANTI	: Calon Penelitian
: 21790225832	: Calon Penelitian
: Hukum Keluarga	: Calon Penelitian
: S-2 (Strata 2)	: Calon Penelitian
: Hakam dalam Masyarakat Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Peran Untuk Adat Dalam Pernikahan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)	: Calon Penelitian
: Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	: Calon Penelitian

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Dengan Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 5 September 2019

an. BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU



Ridarmanto, S.IP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197210061992011002



© Hak cipta milik UIN Suska Riau





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25142  
TENTANG



032010

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 1913/Un04/PPs/PP.00.9/2019 Tanggal 5 Agustus 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **YULIANTI**
2. NIM / KTP : **21790225832**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Konsentrasi : **HUKUM KELUARGA**
5. Jenjang : **S2**
6. Judul Penelitian : **HAKAM DALAM MASYARAKAT MELAYU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS PERAN DATUK ADAT DALAM PERNIKAHAN DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU)**
7. Lokasi Penelitian : **DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 8 Agustus 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Diarangi menjiplak dan menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waktu Konsultasi	Pembimbing / Promotor *	Keterangan	Pembimbing / Promotor	Waktu Konsultasi
Jumat 09/10/19		State Islamic University of Sumatra Utara Kasihan Riau	Out line	
Jumat 20/10/19		Menambah referensi	Bimbingan Bab I	
Rabu 25/10/19		Memperbaiki isi materi	Bimbingan Bab II	
Selasa 01/11/19		Menambah pembahasan	Bimbingan Bab III	
Kabu 09/10/19		Memperbaiki outline secara sistematis	Bimbingan Bab IV	
Selasa 05/11/19		Menandatangani surat pernyataan bimbingan	Bimbingan Acc	

Pekanbaru, 5 November ..... 2019

Pembimbing / Promotor \*

Prof. Dr. Helmi Bani Sani

Waktu Konsultasi	Pembimbing / Promotor *	Keterangan	Pembimbing / Promotor	Waktu Konsultasi
Jumat 31/10/19		Hak cipta milik UIN Suska Riau	1.	
Kabu 25/10/19		Menambah referensi	2.	
Kamis 26/10/19		Menambah referensi	3.	
Kamis 03/10/19		Menambah pembahasan	4.	
Jumat 11/10/19		Memperbaiki outline secara sistematis	5.	
Kamis 15/11/19		Bimbingan & Kasehat	6.	

Pekanbaru, 11/11 ..... 2019

Pembimbing II / Co Promotor \*

Dr. Helmi Bani Sani





# KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS / DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Yulianti  
: 21790225832  
: PPS (Pascasarjana)  
: Hukum Islam  
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	TGL	JUDUL TESIS / DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	09-07-19	Penggunaan Hak Cipta oleh Isni Maripada 3 Tahun di lafak kelas II B pasir Penngaraan menuui Hukum Islam.		Siti Fatimah
2	09-07-19	Hakam dalam Masyarakat Melatu menuui perspektif Hukum Islam (Analisis Peran datuk adat dalam pernikahan di Desa Mata Musu, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan).		Yulianti
3	09-07-19	Hak membatasi bercerja bagi Suami Pasangan rumah tangga dalam undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKORT ditinjau Hukum Islam	Jh	Ahmad Rizali Pitanga
4	09-07-19	Nilai-nilai Al-Qur'an tentang Per-tanian Alami (Tafsir maudhu'i)	D. Mulu	Hendri Murtadi
5	09-07-19	Ketaatan kepada pemimpin perspektif Hadits		Muhammad Thalib

Pekanbaru, 09 Juli 2019  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS / DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: Yulianti  
: 21790225832  
: PPS (Pascasarjana)  
: Hukum Islam  
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HARI/TGL	JUDUL TESIS / DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1 Sabtu 07-09-19	Analisis Persepsi Konsumen tentang Labellisasi Halal pada pemberian produk makanan impor dalam kemasan ditinjau menurut ekonomi syariah di kec. Bengkalis		Iis Sunardi
2 Sabtu 07-09-19	Praktek Jual Beli Mata air sucumbang dalam perspektif ekonomi Islam (Studi di Desa pulau Surac kec. Kampar, kab. Kampar		Muhammad Rizal
3 Sabtu 07-09-19	Analisis Peran stakeholder perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan kinerja pada Bank BNI syariah cab. Pekanbaru		Saru Reza

Pekanbaru, 07 september 2019

Direktur

Prof. Dr. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001





# KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS / DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Yulianti  
: 21790225832  
: PPS (Pascasarjana)  
: Hukum Islam  
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO. HARI/TGL	JUDUL TESIS / DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
Slasas / 17-09-19	Manajemen Pondok Pesantren dalam Meningkatkan mutu Pelayanan Sani di pondok Nurul Islam kampung Baru kec. Gunung Toor kab. Kuansing		Miki Sanjaya
Slasas / 17-09-19	Pengaruh ketersediaan sarana prasarana dan peran guru terhadap pelaksanaan penguatan Pendidikan karakter (PPK) di sekolah Klat Prasek PPK Pekanbaru		Aka Mutiara
Slasas / 17-09-19	Pengaruh kompetensi guru PAI terhadap kecerdasan emosional dan spiritual serta implikasinya dalam mengatasi perilaku menyimpang siswa SMA/ sederajat Pekanbaru		Nurita Sari

Pekanbaru, 17 SEPTEMBER 2019

Direktur

Prof. Dr. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS / DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: Yulianti  
: 21790225832  
: PPS (Pascasarjana)  
: Hukum Islam  
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang menghukumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEKANHARI/TGL	JUDUL TESIS / DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
abu / 23-10-19	Pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap keaktifan belajar siswa di SMPN 5 Kecamatan Moroporan, Damai Pekanbaru		
abu / 23-10-19	Pengaruh peran ibu sebagai wanita karier membangun komunikasi efektif dalam keluarga terhadap sikap anak pada mata pelajaran PAI di SMPN Sukajadi Pekanbaru		
abu / 23-10-19	Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Interaktif dan penggunaan media powerpoint terhadap kreativitas belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan PAI di SMPN Sukajadi Pekanbaru		

Pekanbaru, 23 October 2019

Direktur

Prof. Dr. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001



# KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS / DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Yulianti  
: 21790225832  
: PPS (Pascasarjana)  
: Hukum Islam  
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang menyalin dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HARI/TGL	JUDUL TESIS / DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
11-05-19	Factor -Factor yang mempengaruhi Keberhasilan usaha mikro Mustahik dan pentaauran 2 abay Produktif pada BSM? Kabupaten Kampar.		Diani mairza
11-05-19	studi komperatif tentang peran customer servis dan kepuasan terhadap loyalitas nasabah BSM dengan BNI dicoba Rengas kabupaten indragiri Hulu.		Muhammad Yusuf
11-05-19	Pengaruh Capital Adequacy Non Performing Financing BSM dan pihak ketiga terhadap Financing to deposits Ratio pada bank pembiayaan rakyat di Indonesia		

UIN SUSKA RIAU  
Pekanbaru, 11 Mei 2019  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001





# KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS / DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Yulianti  
: 21790225832  
: PPS (Pascasarjana)  
: Hukum Islam  
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO. SERI/TGL	JUDUL TESIS / DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
10-10-19	Pengaruh Kompetensi Manajerial kepada Sekolah terhadap Kinerja Guru SDIT Se-kecamatan Tampan Kota Pekanbaru		Abdul Wahid Hasibuan
10-10-19	Pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap implementasi standar proses kurikulum PAI edisi Revisi di SMA Negeri Kecamatan Tualang Kab. Siak		Katna Dewi
10-10-19	Konsep pendidikan Budi pekerti Pers Pektif KH. Dewantara		Dendi Muhamad
10-10-19	Studi komparasi pemikiran Imam Al-Ghazali dan Barbara Parshinti tentang Learning style		Wendra

UIN SUSKA RIAU  
Pekanbaru 10 October 2019  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001





# KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS / DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Yulianti  
: 21790225832  
: PPS (Pascasarjana)  
: Hukum Islam  
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PARAF SEKRETARIS	JUDUL TESIS / DISERTASI	KETERANGAN
	Mengeluarkan sperma di luar kemaluan Seorang Istri (Ar) menurut pendapat Imam Malik dalam perspektif Manasidus Syariah	
	Zakatu menurut Ibrahim dalam perspektif Hukum Keluarga	

Pekanbaru, 21 October 2019

Direktur

Prof. Dr. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



# KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS / DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Yulianti  
: 21790225832  
: PPS (Pascasarjana)  
: Hukum Islam  
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO/RI/TGL	JUDUL TESIS / DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
Kamis 07-11-19	Kemampuan guru pendidikan Agama Islam dalam menerapkan kurikulum 2013 dan upaya Membentuk Karakter Siswa Negeri Kecamatan Bangun Purba Kab. Rokan Hulu.	2	
Kamis 07-11-19	Kompetensi guru pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar di SMA Negeri se Kecamatan tuaing	2	

UIN SUSKA RIAU  
Pekanbaru, 07 - Juli 2019  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001



# KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS / DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Yulianti  
: 21790225832  
: PPS (Pascasarjana)  
: Hukum Islam  
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang menghancurkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEKANHARI/TGL	JUDUL TESIS / DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
19-11-19	Perlindungan terhadap anak dari Pornografi pada pasal 15 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ditinjau menurut hukum Islam	22	Sodiqi Jaidid
19-11-19	Indak wanita ditinggal mati oleh suami pasal 170 KHI ditinjau menurut Maqashid Syariah		Edi Irawansyah Irawan
19-11-19	Biaya perobatan istri menurut hukum Islam Analisis pendapat Imam An-nawawi dan Asy-Syaukani		Ali pon Lubis
19-11-19	Kedudukan mamak dalam masyarakat Adat Melayu kampong mudik menurut		Risa Harawi

Pekanhari, 19-11-2019  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001





# KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS / DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Yulianti  
: 21790225832  
: PPS (Pascasarjana)  
: Hukum Islam  
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HARI/TGL	JUDUL TESIS / DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
Kamis 10-10-19	Pengaruh persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap perkembangan wakaf di Kota Pekanbaru.		
Kamis 10-10-19	Factor - factor yang mempengaruhi konsumen membeli di restoran Hama di kota Pekanbaru.		

UIN SUSKA RIAU  
Pekanbaru, 10 Oktober 2019  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar





## SURAT KETERANGAN

Memerangakan bahwa saudara Yulianti, NIM: 21790225832, dengan judul Tesis: *"Agama Dalam Masyarakat Melayu Menurut Persepektif Hukum Islam (Analisis Peran Datuk adat di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)"*, Lulus Cek Plagiasi Tesis sebesar 26 % sesuai standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya ilmiah lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan Pascasarjana UIN Suska Riau yaitu 35 %. Bersama ini dilampirkan hasil akhir pengecekan Turnitin.

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 03 Desember 2019

Pustawan Pascasarjana UIN Suska Riau

Melda Fitriana, A. Md

197408032005012006

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS

Nama	: Yulianti
Tempat/Tgl. Lahir	: Pasir Pinang, 10 Mei 1995
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat Rumah	: Dusun Sei. Mojai, Rt. 022, Rw. 011, Desa Muara Musu, Rokan Hulu
No. Telp/HP	: 0823-8107-5344
Nama Orang Tua	: Hamdan Jalinar

## RIWAYAT PENULIS

SD 002 NEGERI MUARA MUSU	: Lulus Tahun 2006
MTS THAMRIN YAHYA MUARA RUMBAI	: Lulus Tahun 2009
SMA ISLAM AL-KHOIRIYYAH RAMBAH HILIR	: Lulus Tahun 2013
S1 UIN SUSKA RIAU	: Lulus Tahun 2017

## RIWAYAT PEKERJAAN

### a. Guru Privat

## PENGALAMAN ORGANISASI

- Bidang Keagamaan OSIS
- Bendahara ROHIS
- BEM FASIH UIN SUSKA RIAU
- FK MASSYA
- FKII ASY-SYAM UIN SUSKA

## KARYA ILMIAH

- a. (Skripsi) “Pendistribusian Dana Zakat Produktif Menurut Yusuf Qardhawi di Tinjau dari Perspektif Fikih Muamalah”
- b. (Tesis) “Peran Datuk Adat sebagai Hakam dalam Pencegahan Perceraian Suami Istri di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu